

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

BERSATU MELAWAN COVID-19



Edisi 16
April 2020



9 772655 993006

TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widastuti

Wakil Pengarah:
Philip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati

Reporter:
Patricia Samantha S.
Annisa Bonita P.,
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Dum Spiro, Spero!

Selama saya bernapas, saya berharap. Cicero, seorang filsuf, orator hebat dari Romawi Kuno menyampaikan kata-kata magis ini sekitar abad ke-4 Sebelum Masehi.

Ungkapan penuh harapan dari Cicero terasa sangat tepat untuk kita hadirkan kembali saat ini di tengah-tengah pergulatan warga dunia menghadapi pandemi COVID-19.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini. Hingga Selasa (28/4), jumlah orang yang menderita positif COVID-19 mencapai 9.511 dan angka kematian mencapai 773. Kabar baiknya, jumlah pasien yang sembuh adalah 1.254 orang. Sementara secara global, COVID-19 sudah menjangkiti 213 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 2.959.929 serta kematian di angka 202.733.

Berbagai langkah dan strategi dilakukan oleh Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kita saksikan hampir tiap hari digelar rapat kabinet, baik secara paripurna maupun secara terbatas untuk membahas dan memutuskan kebijakan apa yang diambil. Sejumlah regulasi telah ditempuh, dari Perpu, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri.

Pembatasan Sosial
Berskala Besar
(PSBB) pun

ditempuh untuk menjawab permintaan *lockdown* guna memutus dan menghentikan sebaran pandemi Covid-19. Hingga 28 April 2020, setidaknya 20 wilayah menerapkan PSBB, antara lain: Jabodetabek, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Tarakan, Sumatera Barat, Pekanbaru.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pun ikut aktif dalam upaya bersama memutus mata rantai pandemi ini. Beragam aktivitas digelar: komunikasi publik untuk meminta masyarakat jaga jarak: bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah tak henti dilakukan. Seluruh kanal dipakai, media cetak, televisi, radio, elektronik hingga media sosial.

Menteri Kominfo Johnny G Plate bahkan ikut bernyanyi bersama sejumlah tokoh untuk mengkampanyekan betapa gigihnya perjuangan para dokter dan petugas medis dalam usaha menyembuhkan pasien Covid-19. Lagu berjudul *Demi Raga yang Lain* karya Eka Gustiawan dan Yessiel Trivena pun viral di media sosial.

Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain.

Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain

Dunia telah tersenyum, melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya, demi raga yang lain

Engkau Pahlawan dunia, Tuhan kan membalas semua, jerih lelah yang tak ternilai, demi raga yang lain.

Majalah Kominfo Next edisi April 2020 kembali mengangkat topik Bersatu Lawan Covid-19. Kita harus bersatu karena kita yakin dan optimis bahwa pandemi ini akan bisa kita akhiri. Dum spiro, spero!



Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

6 Timeline
Prsiden

12 Timeline
PSBB

20 Aksi
Pemerintah

54 Tokoh

58 Koinfo
VS
COVID-19

84 Teknologi & Gadget

92 Aksi
Masyarakat

106 Jurnal
Foto

114 Apresiasi
Tenaga Medis

This Too Shall Pass

Dibalik keganasan penyebaran virus Corona atau COVID-19, terselip pelajaran-pelajaran penting yang ditimba sekaligus dihayati oleh masyarakat Indonesia, dan juga dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah kesediaan untuk hidup bersih. Kita jadi patuh untuk sering-sering mencuci tangan dan membersihkan tubuh setelah bepergian atau ke luar rumah.

Demikian pula kesadaran untuk menjaga sanitasi lingkungan, menyemprot kawasan dengan disinfektan, tidak bersin sembarangan, tidak melakukan kontak badan, bahkan menerapkan *physical distancing*, menjaga jarak dengan orang lain, secara fisik. Kampung-kampung dan kawasan juga banyak yang menerapkan pembatasan ketat bagi pendatang.

Semua tindakan kompak masyarakat ini menciptakan keindahan di balik kengerian dan ancaman jiwa. Gotong-royong dan tolong-menolong hidup dan tumbuh subur di mana-mana. Kekurangan sumber daya, tenaga, energi, dan dana dari lembaga-lembaga yang paling sibuk seperti rumah sakit dan klinik, dipikul bersama oleh inisiatif masyarakat, membantu tugas pemerintah. Memang begitulah seharusnya kala negara diserang oleh musuh, yang kali ini wujudnya berupa tentara mikroorganisme.

Tidak ada pemerintahan yang tak kewalahan menghadapinya. Tak ada negara yang tak terbata-tata. Semua mengerahkan segenap sumber daya, termasuk sumber daya yang paling penting bagi sebuah negara, yaitu partisipasi rakyat. Rakyat dengan suka rela berbela negara pada situasi yang genting seperti saat ini. Sampai-sampai banyak guyonan yang mengatakan bahwa bela negara pada situasi saat ini adalah bela negara yang paling "mudah" dilakukan, karena cukup dengan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ya, dalam versi joke satire: dengan rebahan kita menyelamatkan dunia.

Sekilas memang tampak sederhana dan mudah: tinggal di rumah. Namun sesungguhnya implementasinya luar biasa sulit. Terutama bagi rakyat kecil, banyak yang harus diperjuangkan dan hanya bisa dilakukan dengan keluar rumah untuk bekerja atau berdagang. Itulah salah satu pertimbangan pemerintah untuk tidak memberlakukan *lockdown* total sebagaimana banyak disuarakan. Tiap pemerintah dan negara di dunia ini punya pertimbangan masing-masing untuk menempuh kebijakan menghadapi serangan pandemi ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo-

KH Maruf Amin memilih untuk mempertimbangkan ekonomi rakyat sebagai pertimbangan tertinggi, dengan tidak melupakan protokol teknis penanganan wabah, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan ini menempatkan pertimbangan atas strategi mitigasi kesehatan dengan ekonomi rakyat, terutama ekonomi menengah ke bawah, sebagai pertimbangan utama untuk selalu mendapatkan jaminan sosial selama dan setelah wabah berlalu. Tentu saja garis besar kebijakan ini harus diikuti segera dengan berbagai regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan agar implementasinya dapat tepat sasaran. Yang jelas, pemerintah tidak gegabah untuk membiarkan rakyat kecil menjadi korban dua kali, yaitu korban secara ekonomi dan korban dalam hal wabah.

Kabar gembira tentang kesembuhan pasien baik orang dalam pemantauan (ODP), pasien dengan pengawasan (PDP), juga sudah mulai banyak terdengar dari seluruh pelosok. Dari mereka kita mendapat cerita-cerita inspiratif yang memperkuat argumen bahwa dengan menerapkan protokol ketat dan juga pikiran yang gembira dan positif, virus ini bisa dilawan.

Indonesia akan luar biasa jika bisa melewati ini. The Economist merevisi prediksi



pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini untuk semua negara-negara anggota G20 gara-gara pandemi. Hasilnya, wabah virus corona (COVID-19) akan membawa hampir seluruh negara-negara G20 jatuh ke jurang resesi. Lebih dari setengah negara-negara yang masuk dalam jajaran G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hanya tiga negara yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020. Anda tahu negara mana saja? China, India, dan Indonesia (kompas.com, 31 Maret 2020).

Oleh sebab itu, marilah kita berbuat yang terbaik dan kompak untuk kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia yang sedang menderita ini. Mungkin

kebijakan pemerintah ada kurang-kurangnya dan tidak cukup memihak kepada Anda, namun dalam kondisi saat ini, mengikuti protokol dan *benchmark* yang tunggal yang disediakan oleh pemerintah, merupakan cara terbaik.

Bukan makhluk luar angkasa, bukan alien, melainkan jasad renik nan mungil inilah yang mempersatukan umat manusia untuk bergotong-royong dan kompak mempertahankan bumi ini. Tanpa kekompakan, umat manusia akan punah mereka kuasai.

This too shall pass.

Mr. President vs Corona

AntaraFoto

24
Januari
2020

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk mewaspadaai potensi masuknya Virus Corona.

"Saya sudah perintahkan ke Menkes untuk diawasi secara detail"

kata Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

27
Januari
2020

Indonesia bersiaga terhadap penyebaran virus corona dengan menyiapkan 100 rumah sakit untuk menangani pasien yang terindikasi terserang virus ini. Dilansir dari akun Instagram @jokowi:

"Kita telah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan dengan fasilitas ruang isolasi untuk pasien dengan gejala penyakit di paru-paru dan saluran pernapasan lain."

30
Januari
2020

Presiden Jokowi memutuskan untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Provinsi Hubei, Tiongkok.

Dalam wawancara dengan wartawan BBC, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa isu virus corona merupakan isu yang penting bagi Indonesia.

"Saya sampaikan kepada para menteri, agar betul-betul dijaga tidak masuk ke Indonesia. Sekali masuk, terutama di destinasi turisme, saya kira ini akan sangat mengganggu income dari devisa di sektor turisme."

Presiden Jokowi memanggil seluruh menteri Kabinet Kerja untuk membahas dampak corona bagi Indonesia.

31
Januari
2020

01
Februari
2020

11
Februari
2020

Proses evakuasi WNI dari Provinsi Hubei dimulai. Presiden Jokowi sangat menghargai dan berterimakasih kepada Pemerintah Tiongkok atas kerjasamanya dalam proses evakuasi.

"Misi penjemputan ini adalah misi yang sangat mulia, yang akan dijalankan dengan penuh kedisiplinan."



Presiden Jokowi memastikan akan mengevakuasi 74 WNI yang berada di Kapal Pesiar Diamond Princess di Jepang.

21
Februari
2020

Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama virus corona di wilayah Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Jokowi menyampaikan ada seorang anak (31 tahun) dan ibunya (64 tahun) yang melakukan kontak dengan pasien positif corona dari Jepang.

02
Maret
2020

Presiden menunjuk Sesditjen P2P Kemenkes (sekarang Dirjen P2P Kemenkes, red.) dr. Achmad Yurianto sebagai juru bicara terkait COVID-19.

02
Maret
2020

22
Maret
2020

Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terdapat empat tower di Wisma Atlet Kemayoran yang bisa menampung 2000 pasien dan dapat langsung digunakan untuk menangani pasien COVID-19.

26
Maret
2020

Dalam KTT Luar Biasa G20 yang berlangsung secara virtual, Presiden Jokowi mengajak negara-negara anggota G20 untuk perang melawan virus corona.

31
Maret
2020

Presiden Jokowi menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menekan dampak ekonomi pandemi corona. Pembebasan ini akan dilakukan selama 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020.

"Kita harus kuatkan kerja sama melawan COVID-19. G20 harus aktif memimpin upaya menemukan anti virus dan obat COVID-19, bersama WHO."

Presiden menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi COVID-19 yang diatur dalam PP, serta menetapkan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Pembentukan gugus tugas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020.

13
Maret
2020

Presiden Jokowi menerapkan social distancing untuk menghadapi penyebaran COVID-19. "Yang paling penting social distancing bagaimana kita menjaga jarak. Dengan kondisi itu kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah," kata Presiden Joko Widodo.

15
Maret
2020

Presiden Jokowi meminta para menteri dan Gugus Tugas COVID-19 segera melakukan rapid test virus corona dengan cakupan yang besar. "Segera lakukan rapid test agar deteksi dini, kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan," ungkap Presiden Jokowi saat membuka ratas virtual "Laporan Gugus Tugas Corona".

19
Maret
2020

01
April
2020

Presiden Jokowi meninjau pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular, terutama untuk penanganan COVID-19, di Pulau Galang, Kepulauan Riau. RS darurat ini memiliki 360 tempat tidur untuk penanganan korona, 20 tempat tidur untuk isolasi ICU, dan 30 ruangan isolasi khusus non-ICU.

02
April
2020

Presiden Jokowi menyiapkan sejumlah skenario terkait arus mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona.

1. Mengganti hari libur nasional di hari lain
2. Memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID -19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

12
April
2020

Presiden mengambil 5 langkah untuk menyelamatkan nasib pekerja di tengah pandemi COVID-19

1. Membuka pendaftaran Kartu Prakerja
2. Insentif untuk korban PHK
3. Terbitkan surat utang
4. Insentif untuk pekerja medis
5. Kepastian THR

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak virus corona Covid-19 mulai disalurkan pekan ini.

13
April
2020

Presiden menetapkan wabah COVID19 sebagai Bencana Nasional melalui penerbitan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

14
April
2020

Presiden Jokowi mendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi untuk melawan pandemi COVID-19.

"Kita tidak punya pilihan, kecuali menang melawan virus ini. Bersatu, bersinergi dan berkolaborasi adalah jawabannya,"

tegasnya dalam KTT ASEAN Khusus Tentang COVID-19 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

AntaraFoto

Seluruh kekuatan pemerintah,
kekuatan negara dan bangsa,
bergerak untuk mengatasi
kesulitan ini, baik soal
kesehatan mau pun masalah
sosial ekonomi yang
mengikutinya.

Presiden Joko Widodo



B

B

S

P

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penanganan Pandemi COVID-19 di Republik Indonesia

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19 yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. PSBB ini meliputi pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan PSBB paling sedikit meliputi:



Peliburan sekolah dan tempat kerja



Pembatasan kegiatan keagamaan



Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Setiap wilayah yang akan mengajukan PSBB, wajib memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Peningkatan signifikan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit.
- Penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah.
- Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain kriteria di atas, penetapan PSBB ditetapkan atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga harus memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam menetapkan PSBB.

Hingga dengan Minggu (19/4/2020), sudah ada 17 provinsi/kabupaten/kota yang telah mengajukan status PSBB. Beberapa daerah statusnya disetujui, beberapa lainnya belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. Berikut disampaikan daerah-daerah yang sudah ditetapkan dengan status PSBB:

3 Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

9 daerah yang telah disetujui PSBB yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota

Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Dalam pedoman hukum pemberlakuan pelaksanaan PSBB di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), setiap Kepala Daerah mencantumkan beberapa poin penting yang sejenis seperti: pedoman pelaksanaan PSBB, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan COVID-19 hingga sanksi. Jadi, dalam pelaksanaan PSBB setiap daerah juga memenuhi kebutuhan pokok dasar masyarakatnya melalui bantuan sosial yang berbeda-beda di setiap daerah. Pemberian insentif juga diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdampak dalam pelaksanaan PSBB ini.

Pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah. Sehingga komunikasi pusat dan daerah betul-betul harus selalu dilakukan. Sehingga semuanya kita memiliki satu visi, memiliki satu garis yang sama dalam menyelesaikan COVID-19 ini.



Presiden Joko Widodo



Pembatasan Sosial Berskala Besar

| Provinsi DKI Jakarta

Dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020, selain membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19, peraturan ini juga mencakup peningkatan antisipasi

perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19 hingga penanganan dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID- 19.

PSBB Provinsi DKI Jakarta diberlakukan sejak Jumat, 10 April 2020, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi sejak 8-9 April. PSBB ini berlaku selama 14 hari (dapat diperpanjang).

PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:

- melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- menggunakan masker di luar rumah.

Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB di lingkungan Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- aktivitas bekerja di tempat kerja;
- kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- kegiatan sosial dan budaya; dan
- pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Ketentuan PSBB untuk Moda Transportasi: MRT, LRT, Transjakarta, Kereta Api Penumpang jarak jauh atau antar kota, Kereta Api Commuter Line, Angkutan bus dalam dan/atau antar kota tetap beroperasi dengan menerapkan jarak aman antar penumpang dan jumlah penumpang dibatasi 50%.

Pengecualian Aktivitas Bekerja untuk pemenuhan kebutuhan pokok (penyediaan, pengolahan dan pengiriman) pada sektor bahan pangan/makanan/minuman, kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

Panduan dan informasi mengenai PSBB di Provinsi DKI Jakarta secara umum dapat diakses melalui <https://corona.jakarta.go.id/id>

"Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan, dimana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah,"

– Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan



Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

**PERGUB
NO. 33
TAHUN 2020**

Kendaraan Mobil Penumpang Pribadi

Wajib Menggunakan Masker dalam Mobil

SEDAN  = 4-5  = 3

MPV  = 8  = 4



Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi



Wajib Menggunakan
Sarung Tangan



Wajib Menggunakan
Masker



Hanya
Mengangkut
Barang (Bukan
Penumpang)

Pengguna Sepeda Motor Pribadi



Wajib Menggunakan
Sarung Tangan



Wajib Menggunakan
Masker



Pembatasan Sosial Berskala Besar

| Bogor - Depok - Bekasi

Pengajuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lingkungan Provinsi Jawa Barat sudah diajukan melalui Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Surat tersebut disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/248/2020 yang menetapkan lima wilayah utama pemberlakuan PSBB di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

PSBB di sebagian wilayah Jawa Barat berlaku mulai 15 April 2020 dengan masa berlaku 14 hari yang dapat diperpanjang sewaktu-waktu.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di Bodebek (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok) mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Operasional Transportasi

Memperbolehkan operasional moda transportasi dengan beberapa syarat. Pertama, pembatasan jam operasional mulai pukul 06.00-18.00 WIB. Sementara itu, moda transportasi umum tetap

beroperasi dengan mengurangi jumlah penumpang sebanyak 50 persen. Tindakan serupa juga berlaku bagi transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, layanan barang (logistik), dan layanan kesehatan.

Untuk pembatasan kegiatan di masyarakat, Pergub ini juga mengatur pembatasan institusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, tempat ibadah, dan pembatasan kegiatan sosial budaya.

Namun, ada beberapa kegiatan yang tidak dibatasi. Aktivitas tersebut yaitu : pelayanan kesehatan oleh institusi/lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, semua jenis layanan pemerintahan, BUMN atau BUMD yang bergerak dan turut dalam penanganan Covid-19 dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa sektor usaha yang juga diperbolehkan beroperasi yaitu sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri sebagai objek vital tertentu dan kebutuhan sehari-hari.

Pelaku bisnis juga diimbau tidak menaikkan harga barang selama PSBB demi menjaga keberlangsungan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

9 sumber bantuan yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat Jawa Barat meliputi:

1. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kartu Sembako.
3. Kartu Prakerja untuk pengangguran / korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Dana Desa bagi warga di pedesaan.
5. Bantuan Presiden untuk warga perantau (Rp 600 ribu selama 3 bulan).
6. Bantuan Sosial Kementerian Sosial (Rp 600 ribu selama 3 bulan).
7. Bantuan Provinsi (Rp 500 ribu selama 4 bulan).
8. Bantuan Pemerintah Kota/Kabupaten.
9. Bantuan nasi bungkus untuk warga yang tidak memiliki KTP atau anak jalanan.



Kepada mereka yang melanggar aturan, yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas, bukan kelompok yang termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, itu nanti akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang.

Paket Bantuan Sosial Jawa Barat

Bantuan tunai dan pangan non tunai dengan total senilai Rp 500.000

Rp 350.000 Dalam Bentuk Sembako

Beras

Gula

Sarden

Mie Instan

Vitamin

Telur, dll



Rp 150.000 Uang Tunai

Penyediaan Sembako

Penyediaan sembako oleh pedagang pasar yang berasosiasi dengan Bulog

Pengiriman Sembako

Pengiriman sembako oleh PT Pos Indonesia + Ojek Online

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil



Pembatasan Sosial Berskala Besar

| Tangerang Raya

Sumber Hukum: Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) atau Tangerang Raya diatur dalam Peraturan Gubernur Banten (Pergub) yang ditandatangani pada 15 April 2020 lalu. Masa berlakunya selama 16 (enam belas) hari yaitu sejak 18 April hingga 3 Mei 2020. Sama seperti PSBB yang diterapkan di kota lain, PSBB Tangerang Raya juga memuat tentang pembatasan aktivitas luar rumah, kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan mulai dari kegiatan ibadah hingga aktivitas pekerjaan.

PSBB Tangerang Raya juga mencakup pasal yang menyebutkan adanya pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, seperti:

Penderita tekanan darah tinggi
Pengidap penyakit jantung
Pengidap diabetes

Penderita penyakit paru-paru
Penderita kanker
Ibu hamil dan menyusui
Usia lebih dari 60 tahun



Bantuan Sosial untuk masyarakat Tangerang Raya berupa uang Rp 500 ribu selama maksimal 3 bulan yang akan disalurkan melalui transfer bank. Penerima bantuan tersebut khusus bagi warga yang terdampak virus Corona dan di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan ke karyawan yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK).

Dokumen PSBB Tangerang Raya juga merujuk dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta maupun Jawa Barat yang sudah mulai melaksanakan PSBB sebelumnya. Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) kini sudah melengkapi koleksi peraturan mengenai PSBB.

Check Point COVID-19 di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan Serpong

Exit Tol Rawa Buntu BSD
Perempatan Viktor

Kecamatan Serpong Utara

Perempatan Gading

Kecamatan Ciputat Timur

Pertigaan Sandratex,
Jl. Ir. H. Juanda

Kecamatan Pondok Aren

Jl. Boulevard Bintaro,
Seberang Showroom
BMW

Kecamatan Setu

Puspitek,
Jl. Raya Puspitek

Kecamatan Pamulang

Jl. R.E. Martadinata



“ Saya telah menerbitkan Pergub berikut SK Gubernur yang mengatur pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya. Hal ini diharapkan agar penerapannya di ketiga wilayah tersebut dapat berjalan efektif.

Gubernur Banten, Wahidin Halim



ASN tak Mudik,

Putus Penularan Covid-19

Jakarta, Kominfo - Tradisi mudik pada saat lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu bagi orang yang hidupnya merantau jauh dari daerah asalnya. Sehingga tak jarang, tiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri warga merantau berbondong-bondong memadati transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk melakukan mudik. Namun berbeda halnya ketika Indonesia dilanda situasi pandemi pada saat ini.

Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait aturan mudik. Salah satunya adalah larangan mudik. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-POLRI, maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak melakukan mudik lebaran. Bukan tanpa dasar, hal itu dilakukan demi mencegah meluasnya pandemi akibat virus Corona ini.

“Kebijakan mengenai mudik, hari ini sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (09/04/2020).

Selaras dengan keputusan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2020 tentang larangan mudik bagi ASN beserta keluarganya, dan larangan untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah.

Dalam suratnya, Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang memungkinkan meningkatnya risiko penyebaran Covid-19.

Selang beberapa waktu setelah mengeluarkan larangan mudik bagi kalangan ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN, Presiden Joko Widodo turut mengeluarkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, mobilitas warga yang cukup besar dalam waktu bersamaan menjadi sarana penularan dan penyebaran Covid-19.

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/04/2020).

Sanksi Bagi ASN yang Melanggar

ASN yang tetap mudik akan dikenakan sanksi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. “Kami mengharapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pimpinan satuan kerja memonitor staf masing-masing jangan sampai mudik. Bila nekat mudik agar diberi sanksi yang keras,” tegas Atmaji di Jakarta, Rabu (22/04/2020).

Larangan mudik ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 36/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Atmaji, ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya mudik, serta mengajak masyarakat di lingkungannya untuk tidak mudik.

Ia turut menegaskan, ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain mudik, Atmaji menjelaskan bahwa ASN dilarang mengajukan cuti selama berlakunya darurat Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. PPK diminta tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Pengecualian

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN, Haryomo Dwi Putranto menegaskan bahwa pada prinsipnya SE ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB yang 3 kali diterbitkan di tahun 2020, yang pada prinsipnya adalah larangan bagi para ASN untuk melakukan kegiatan mudik, atau bepergian keluar daerah.

“Dalam 3 SE itu memang sudah dikategorikan mulai dari imbauan, larangan, sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sehingga pasti banyak pertanyaan untuk menindaklanjuti SE itu bagaimana hukumannya dan cara-caranya pada SE Kepala BKN Nomor 11 tahun 2020,” kata Deputi PMK BKN.

Deputi PMK BKN Haryomo Dwi Putranto menerangkan kata kunci penjatuhan hukuman atau tidak dalam SE Menteri PANRB juga disampaikan dalam keadaan terpaksa ASN dapat bepergian dengan izin atasan. “Ini termasuk juga jika keluarganya sakit. Kata kuncinya adalah atasan berikan izin dengan mempertimbangkan ketentuan dan potensi kerugian bagi orang lain,” tambah Haryomo.

Namun demikian, cuti ini dikecualikan untuk PNS yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Supranawa Yusuf menyatakan bahwa SE Menteri PANRB pertama dikeluarkan pada 30 Maret 2020. Apabila ada ASN yang melakukan pergerakan mudik sebelum SE ini maka tidak dikenakan pelanggaran.

“Jika seorang ASN yang sakit atau anggota keluarga sakit saat SE ini sudah keluar, Waka BKN menjawab mengacu kepada SE Menpan terakhir, kasus itu termasuk dalam pengecualian karena yang bersangkutan sakit dan dapat

mengajukan cuti alasan sakit. Hal ini juga berlaku kalau ada kerabat atau keluarga yang sakit," jelas Supranawa.

Soal bepergian ke luar daerah yang diatur dalam SE, Waka BKN menyebutkan bahwa yang dilarang adalah pergerakan dalam arti satu tempat ke tempat lain. "Selama situasi wabah ini, ASN diharapkan tidak melakukan pergerakan apapun terlepas dari jarak titik yang ditempuh. Esensinya bukan persoalan jarak tempuh, tetapi larangan batasan pergerakan aktivitas mudik bagi ASN selama masa darurat ini," kata Supranawa.

Penjatuhan Sanksi

Apabila terjadi ketidaktaatan terhadap ketentuan pembatasan tersebut yang dilakukan oleh ASN, sambung Waka BKN, tentu akan mempunyai konsekuensi hukum berupa hukuman disiplin bagi ASN.

Metode penjatuhan hukuman disiplin PP 53 2010 ini, menurut Waka BKN Supranawa, bisa dilakukan secara online termasuk pemeriksaannya. "Selama ini juga pertemuan kita lakukan virtual. Proses administrasi juga kita lakukan secara digital. Silakan PPK instansi menyiapkan metode atau tools pemeriksaan ini secara online," tandasnya.

PPK juga dapat langsung turun tangan melakukan pemeriksaan. Berita acara juga bisa disiapkan secara online. Bila diperlukan

BKN juga akan mengeluarkan pedoman pemeriksaan.

Menjawab pertanyaan soal mendampingi istri melahirkan, Waka BKN menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap atasan memang dilarang memberikan cuti sejak dan selama masa pandemi ini. "Namun ada pengecualiannya dalam situasi tertentu. Misalnya ketika ada yang sakit, meninggal, termasuk suami yang mendampingi istri melahirkan," pungkasnya.

Proses hukuman disiplin tetap mengacu pada PP 53/2010 dan masing-masing PPK diwajibkan melakukan pendataan terhadap ASN di lingkungannya, khususnya soal pergerakan ASN di tengah pandemi ini.

Waka BKN menyebut, pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, sudah dituangkan dalam surat edaran Kepala BKN tersebut.

Beberapa poin pada SE Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, sebagai berikut:

Pertama, mengatur atau mengintegrasikan tentang kategori pelanggaran. Kedua, berisi tentang jenis-jenis

hukuman disiplin yang bisa dikenakan kepada ASN. Ketiga, bagaimana atau tata cara untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

"Tentu ini kita harus mengacu pada regulasi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang P3K yang dia juga men-deliver bahwa PP 53 dalam hal penjatuhan hukuman disiplin ini," jelasnya.

Keempat, lanjutnya, kewajiban bagi pejabat kepegawaian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas para ASN. Kelima, kewajiban bagi pengelola kepegawaian untuk melakukan entry data berisi hukuman disiplin melalui saluran atau link SAPK BKN.

Bukan Pengekangan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan dan melarang anggota korps Bhayangkara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Polri bepergian ke luar daerah atau mudik pada lebaran tahun 2020.

"Ya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. TR (Telegram Rahasia) Kapolri yang dikeluarkan pada hari ini berkaitan dengan untuk tidak melakukan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi anggota kepolisian dan PNS



Sumber Foto : Antara Foto

Polri," paparnya saat menggelar virtual konferensi pers melalui akun Instagram, Jumat (03/04/2020).

Selain mengeluarkan surat perintah larangan mudik bagi anggota dan PNS di lingkungan Polri, Kapolri juga turut mendorong agar seluruh jajarannya untuk ikut menerapkan kebijakan pemerintah dalam menerapkan *physical distancing*, serta menjaga hidup bersih dan sehat.

"Hal tersebut dipandang perlu untuk menghindari penyebaran virus corona atau Covid-19. TR itu juga memuat agar seluruh anggota dan PNS Polri menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu," pungkas Argo.

Waka BKN Supranawa menyebutkan Pemerintah sudah menerbitkan aturan pembatasan lalu lintas atau pergerakan masyarakat ditengah situasi wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. "Secara umum pembatasan itu mengacu pada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19," ujarnya.

Supranawa menegaskan SE Menpan bukan sebagai langkah pengekanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kontribusi bersama komponen masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19. "Kebijakan pembatasan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para ASN," ujarnya.*

AKSI KEMENSOS

Upaya Kemensos Terkait

Pencegahan Covid-19

Sejak mewabahnya virus corona atau Covid-19 di Indonesia, seluruh jajaran kementerian saling bersinergi untuk menanggulangi penyebaran virus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial RI, Juliari Batubara, turut mendorong pilar-pilar sosial yang bermitra dengan Kemensos agar menjadi motor dan pelopor gerakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayah tugas masing-masing. Menurut Mensos, pilar sosial yang terdiri dari relawan berbasis masyarakat ini dalam tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi garda terdepan Kementerian Sosial.

Sumber Berita :

<https://kemsos.go.id/upaya-kemensos-terkait-pencegahan-covid-19>

Beberapa pilar-pilar sosial yang dimaksud di antaranya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Pilar sosial juga bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan potensi sosial setempat, dengan jalan mendorong berbagai program atau gerakan yang mempercepat pemberantasan virus korona.

Siapkan “*Social Safety Net*”

Salah satu program Kemensos adalah Bantuan Sosial (bansos) sebagai *social safety net*. Bansos diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin dan rentan dari dampak ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19. Bantuan sembako ini ditargetkan untuk keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), guru kontrak kerja, guru honorer, dan penghuni rumah susun (Rusun), juga pekerja harian yang tinggal di DKI Jakarta.

Kementerian Sosial mendapat alokasi instrumen fiskal untuk menanggulangi dampak ekonomi sebesar Rp4,56 triliun, dari total Rp10 triliun yang disiapkan pemerintah. Adapun total anggaran untuk bansos Program Sembako sebesar Rp28,08 triliun.

Terdapat empat instrumen (bansos) sebagai *social safety net* sebagai bentuk dukungan Kemensos dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.

Pertama, penyaluran bansos Program Sembako. Kementerian Sosial telah meningkatkan indeks bantuan Program Sembako dari semula Rp150.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan.

Kenaikan bansos sebesar Rp50.000 tersebut diperuntukkan bagi 15,2 juta KPM Program Sembako, yang diberikan selama enam bulan

dari Maret hingga Agustus 2020. Kebijakan ini ditempuh karena dampak penyebaran virus korona dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia.

Program Sembako diluncurkan dengan tujuan untuk 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Melalui Program Sembako diharapkan KPM mendapat manfaat, antara lain: 1) Meningkatkan ketahanan pangan KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial; 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; 4) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT);

Selain itu, juga diharapkan dapat 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan 6) Dalam jangka panjang mencegah terjadinya *stunting*.

Instrumen bansos yang kedua adalah mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya.

Percepatan pencairan bansos PKH ini diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus korona.

Instrumen selanjutnya adalah pencairan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kemensos telah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menggunakan CBP sesuai kewenangannya,

dengan tujuan agar kepala daerah tetap dapat menjaga kebutuhan pokok warganya.

Instrumen lainnya yang tak kalah penting adalah penyaluran santunan kematian untuk ahli waris dari tiap korban yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebesar Rp15 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan keluarga korban, dan sebagai bentuk perhatian negara terhadap masyarakat yang terdampak virus korona. Saat ini, Kemensos sedang melakukan asesmen terhadap para korban meninggal akibat COVID-19 tersebut.

Perlindungan dan Dukungan Psikososial bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial Terhadap Penyandang Disabilitas juga menjadi perhatian Kementerian Sosial. Penyandang disabilitas dengan ragam disabilitasnya adalah salah satu kelompok yang rentan terinfeksi virus corona baru atau COVID-19. Kebijakan pencegahan virus corona bagi penyandang disabilitas, tidak dapat serta merta diimplementasikan bagi sebagian penyandang disabilitas.

Strategi *social distancing* sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 pun sulit dilakukan beberapa penyandang disabilitas karena keterbatasan mobilitas, misalnya penyandang

disabilitas sensorik netra yang hanya dapat melakukan kontak melalui sentuhan dan rabaan terhadap suatu benda, serta bergantung pada pendamping dalam melakukan interaksi sosial.

Perlindungan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas sangat penting. Tindakan pencegahan diperlukan untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan Balai Besar/ Balai/Loka serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas atau lembaga lainnya. Perawatan juga harus dilakukan untuk menghindari stigmatisasi Penyandang Disabilitas yang mungkin terpapar virus. Pengaturan Layanan Rehabilitasi Sosial harus terus menjadi lingkungan yang ramah, penuh hormat, inklusif, dan mendukung untuk semua.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menerbitkan buku Pedoman Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial Terhadap Penyandang Disabilitas Sehubungan Dengan Terjadinya Wabah Covid-19 di Lingkungan Balai Besar/ Balai/Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya, sebagai salah satu pedoman untuk menjaga kesehatan fisik dan mental sekaligus mengurangi risiko terinfeksi COVID-19 bagi disabilitas.

Selain penyandang disabilitas, Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos juga menerbitkan Pedoman Melindungi Anak dari Ancaman COVID-19 bagi anak-anak yang ditempatkan di pengasuhan di luar keluarga dan tetap berada di sana selama masa darurat Covid-19, seperti di Balai /Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga Lainnya.

Pedoman tersebut mengatur sejumlah hal penting sebagai bagian dari tindakan perlindungan dan pengasuhan anak di Balai/Loka dan LKSA untuk mencegah dan menangani penularan Covid-19. Salah satunya langkah yang perlu dilakukan oleh pengurus, pengelola, ataupun pengasuh untuk mengenali ancaman dan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Pengurus, pengelola, atau pengasuh di Balai/Loka anak dan LKSA adalah “pengganti” orangtua anak yang paling bertanggungjawab atas keselamatan, kesehatan, dan perlindungan anak dan semua warga di lingkungan lembaganya.

Selain itu juga terdapat langkah pengembangan tindakan perlindungan dan pengasuhan yang tepat bagi anak, seperti menyampaikan pesan-pesan yang relevan dan penting dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami anak, yang memfokuskan pada fakta positif bahwa COVID-19 dapat dicegah dan disembuhkan, memberi kesempatan anak-

anak bertanya, serta tetap tenang dan yakinkan anak-anak bahwa pengasuh dan orang dewasa lainnya akan menjaga mereka tetap sehat dan siap dimintai bantuan.

Langkah lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi, menyediakan menu dengan gizi seimbang, serta terus berkoordinasi dengan otoritas sosial seperti Dinas Sosial.

Peran Kemensos lainnya di bidang Rehabilitasi Sosial dalam penanganan COVID-19 yang tak kalah penting adalah menyiapkan Balai

Rehabilitasi Sosial/Diklat untuk tempat karantina, khususnya Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Tempat yang sudah disiapkan tersebut di antaranya Rumah Perlindungan dan *Trauma Center* (RPTC) Tanjung Pinang yang melayani pemulangan WNI Migran KPO dari Johor Baru, Malaysia, dengan kapasitas 400 orang, RPTC Bambu Apus atau Balai Bambu Apus dengan kapasitas 150 orang, dan Balai Watunas "Mulya Jaya" Bekasi dengan kapasitas 130 orang. Tempat karantina ini akan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan dalam proses karantina, agar semua bisa sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya penanganan Covid19.



PEDOMAN PELINDUNGAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Terhadap Penyandang Disabilitas

Sehubungan dengan Terjadinya Wabah Covid-19 di Lingkungan Balai Besar/Balai/Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya.

Ditjen Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial



PEDOMAN MELINDUNGI ANAK DARI ANCAMAN COVID-19

di Lingkungan Balai/Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga Lainnya.

Ditjen Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial



AKSI PUPR

Perangi Dampak Covid-19,

PUPR

Percepat Program Padat Karya

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai (*cash for work*) di tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 8,64 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Sumber Berita :

<https://www.pu.go.id/berita/view/18079/dorong-daya-beli-masyarakat-saat-pandemi-covid-19-kementerian-pupr-percepat-realisisi-program-padat-karya-2020>

<https://pu.go.id/berita/view/18129/kementerian-pupr-mulai-program-padat-karya-2020-di-34-provinsi-sebesar-rp-10-triliun-untuk-dorong-daya-beli-masyarakat-saat-wabah-covid-19>

<https://www.pu.go.id/berita/view/18104/melalui-instruksi-menteri-pupr-hak-hak-pekerja-konstruksi-tetap-dijamin-ditengah-pandemi-covid-19>

Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

Pada tahun 2020 ini, PAMSIMAS akan dilaksanakan di 5.053 desa dengan anggaran Rp767 miliar, SANIMAS di 1.026 lokasi dengan anggaran Rp398 miliar, P3TGAI di 6.000 lokasi dengan anggaran Rp1,350 triliun, dan jembatan gantung 148 unit senilai Rp710 miliar.

Sementara KOTAKU akan dilaksanakan di 364 kelurahan dengan anggaran Rp259 miliar, PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 79 miliar, peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166.000 unit dengan anggaran Rp3,497 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 12.750 unit dengan anggaran Rp818 miliar.

PAMSIMAS dan SANIMAS merupakan program padat karya yang akan dilaksanakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pencegahan stunting, atau gangguan pertumbuhan pada anak balita, melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Beberapa kegiatan PAMSIMAS yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.

Sementara kegiatan SANIMAS yakni prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan



air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR).

Program padat karya selanjutnya dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air adalah P3TGAI yang tersebar di 6.000 lokasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan air bagi kawasan perdesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kecil (luas kurang dari 150 ha), irigasi tersier,

Sumber Foto : PUPR



dan/atau irigasi desa yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Metode pelaksanaan P3TGAI dengan Swakelola - Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp 200 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87% atau Rp 195 juta dan pendampingan oleh P3A sebesar 13% atau Rp 30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja.

Saat ini sebanyak 1.075 desa sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan fisiknya mulai awal April 2020.

Selanjutnya adalah KOTAKU yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni,

produktif dan berkelanjutan. Pada 2016-2019 KOTAKU telah mencakup 5.086 kelurahan. Lima komponen kegiatan KOTAKU adalah perbaikan saluran, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dibawah tanggung jawab Ditjen Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru. Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta. Dengan stimulus ini diharapkan timbulnya prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama.

Hak Pekerja Konstruksi Dijamin

Seperti dikutip dari laman pu.go.id, di tengah merebaknya pandemi Virus Corona (COVID-19), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Berbagai langkah pencegahan COVID-19 telah dilaksanakan Kementerian PUPR, salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.

Instruksi tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan COVID-19 dan adanya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan serta atas pertimbangan perkembangan pandemi COVID-19.

Poin-poin penting diinstruksikan oleh Menteri PUPR dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di tengah merebaknya Virus COVID-19, yakni:

Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar jika teridentifikasi: (i) Memiliki risiko tinggi

akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; (ii) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau (iii) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tersebut harus mengacu pada Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.

Hal ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan COVID-19, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Sumber Foto Unsplash

Secara garis besar, skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Instruksi Menteri mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19;
- 2) Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan
- 3) Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
- 4) Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan

Sedangkan upaya tindak lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

- 1) Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
- 2) Mekanisme Pergantian Spesifikasi
- 3) Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi, lebih lanjut diatur mengenai kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Skema Protokol Pencegahan COVID-19 pada Instruksi Menteri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi.

Diharapkan dengan adanya Instruksi Menteri ini, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19

AKSI KEMENDIKBUD

Kemendikbud Hadirkan Program “Belajar dari Rumah” di TVRI

Sejak 13 April 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghadirkan Program “Belajar dari Rumah” di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Program tayangan ini menjadi salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua selama masa belajar di rumah di tengah wabah Covid-19.

Program Belajar dari Rumah di TVRI diisi dengan berbagai tayangan edukasi, seperti pembelajaran untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan menengah, tayangan bimbingan untuk orang tua dan guru, serta program kebudayaan di akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Program ini direncanakan akan berjalan selama tiga bulan hingga Juli 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan program ini merupakan upaya memfasilitasi kegiatan belajar mengajar terutama bagi sekolah di daerah yang mengalami keterbatasan akses internet dan kesulitan dalam penggunaan *platform* teknologi. “Meskipun Kemendikbud sudah menjalin kerja sama dengan *platform* teknologi atau *online learning* milik swasta untuk memfasilitasi siswa belajar di rumah, Kemendikbud menyadari bahwa masih banyak

Sumber Berita :

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/ragam-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri>

sekolah di daerah yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan *platform* teknologi, hingga keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa,” jelas Menteri Nadiem.

“Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media televisi. Karena itu kami meluncurkan program Belajar dari Rumah,” ujar Mendikbud dalam konferensi video pada Kamis, (9/4/2020).

Diharapkan program Belajar dari Rumah ini dapat memperluas akses layanan pendidikan

bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan akses internet maupun keterbatasan ekonomi. TVRI merupakan saluran gratis yang bisa dinikmati masyarakat di berbagai daerah, dan bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, dan orang tua untuk membantu pembelajaran dari rumah selama pandemi Covid-19.

“Ini merupakan respons cepat atas keluhan masyarakat di daerah yang tidak memiliki akses internet, dan masukan dari Komisi X DPR saat Rapat Kerja pada 27 Maret lalu. Semangat program kita tetap Merdeka Belajar,” tutur Mendikbud.



Jadwal Acara
Program “Belajar dari Rumah” di TVRI

Waktu (WIB)	Sasaran Utama	Senin 13 April 2020	Selasa 14 April 2020	Rabu 15 April 2020	Kamis 16 April 2020	Jumat 17 April 2020	Sabtu 18 April 2020	Minggu 19 April 2020
10.30-11.00	Siswa/Siswi SMP dan sederajat	Kebudayaan: Cagar Budaya Bawah Air di Karimunjawa	Mantul - Matematika Manfaat Betul: Perbandingan	Ronggowarsito dan Javanologi	Mantul - Matematika Manfaat Betul: Teorema Pythagoras	Tradisi Asli Nusantara: Ayam Betutu		
14.03-14.30	Siswa/Siswi SMA/SMK dan sederajat	Virus	Matematika: Frekuensi Harapan	Noken Papua	Trigonometri	Bendera, Lambang Negara, dan Pancasila	Budaya Saya Peninggalan Candi di Sumatera Barat	Budaya Saya Candi Megah di Tanah Jawa
14.30-15.00	Orang tua/Guru	Keluarga Indonesia: Tahap Perkembangan Anak	Keluarga Indonesia: Mengasuh anak dengan kebutuhan khusus	Keluarga Indonesia: Tahap Perkembangan Anak	Keluarga Indonesia: Pengasuhan di Era Digital	Keluarga Indonesia: Disiplin Positif	Ragam Indonesia Panggung Kaebauk Pekan Kebudayaan Nasional: Reog Dog Dog Temuan Somo, Orodukuh, Sangiran Festival Palu Salonde	Ragam Indonesia Senjata Keris Desa Bawomataluo, Nias Selatan Museum Manusia Purba Sangiran
19.00-21.00		Film Anak: Knight Kris						
21.30-23.30			Film Nasional: Wonderful Life	Film Nasional: Nyai	Film Nasional: Trinity, The Nekad Traveler		Film Nasional: Jakarta Maghrib	

Catatan: Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut.

Kemendikbud.go.id



Jadwal Acara
Program "Belajar dari Rumah" di TVRI

Waktu (WIB)	Sasaran Utama	Senin 13 April 2020	Selasa 14 April 2020	Rabu 15 April 2020	Kamis 16 April 2020	Jumat 17 April 2020	Sabtu 18 April 2020	Minggu 19 April 2020
08.00-08.30	Siswa/Siswi PAUD dan sederajat	Jalan Sesama	Jalan Sesama	Jalan Sesama	Jalan Sesama	Jalan Sesama	Cerita Sabtu Pagi Animasi: Misteri Pesawat Mainan	Cerita Minggu Pagi Animasi: Aqueissance Animasi: Jelajah Pulau
08.30-09.00	Siswa/Siswi SD Kelas 1-3 dan sederajat	Sahabat Pelangi: Ayo Memancing	Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan: Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Cacah	Sahabat Pelangi; Hari Pahlawan	Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan: Sifat-Sifat Bangun Datar	Sahabat Pelangi; Panen Mangga	Dokumenter Remaja: Sasandu	Animasi: Mesin Waktu Fiksi Remaja: Bahasa Isyarat Bahasa Ibu Fiksi Remaja: Cerita Risma Fiksi Remaja: Gulung Runding
10.00-10.30	Siswa/Siswi SD Kelas 4-6 dan sederajat	Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan: Bilangan Akar dan Berpangkat	X-Sains: Magnet dan Kelistrikan	Dongeng Kita: Cerita rakyat dan lagu daerah	Tradisi Asli Nusantara: Kain Tenun Sengkang	Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan: Pengolahan Data (Mean, Median, Modus)	Gelar Wicara (Talkshow) Asli Indonesia Gelar wicara: Seri dan Industri Kreatif Menghadapi Pandemi episode 1	Gelar Wicara (Talkshow) Asli Indonesia Gelar wicara: Seni dan Industri Kreatif Menghadapi Pandemi episode 2

Catatan:

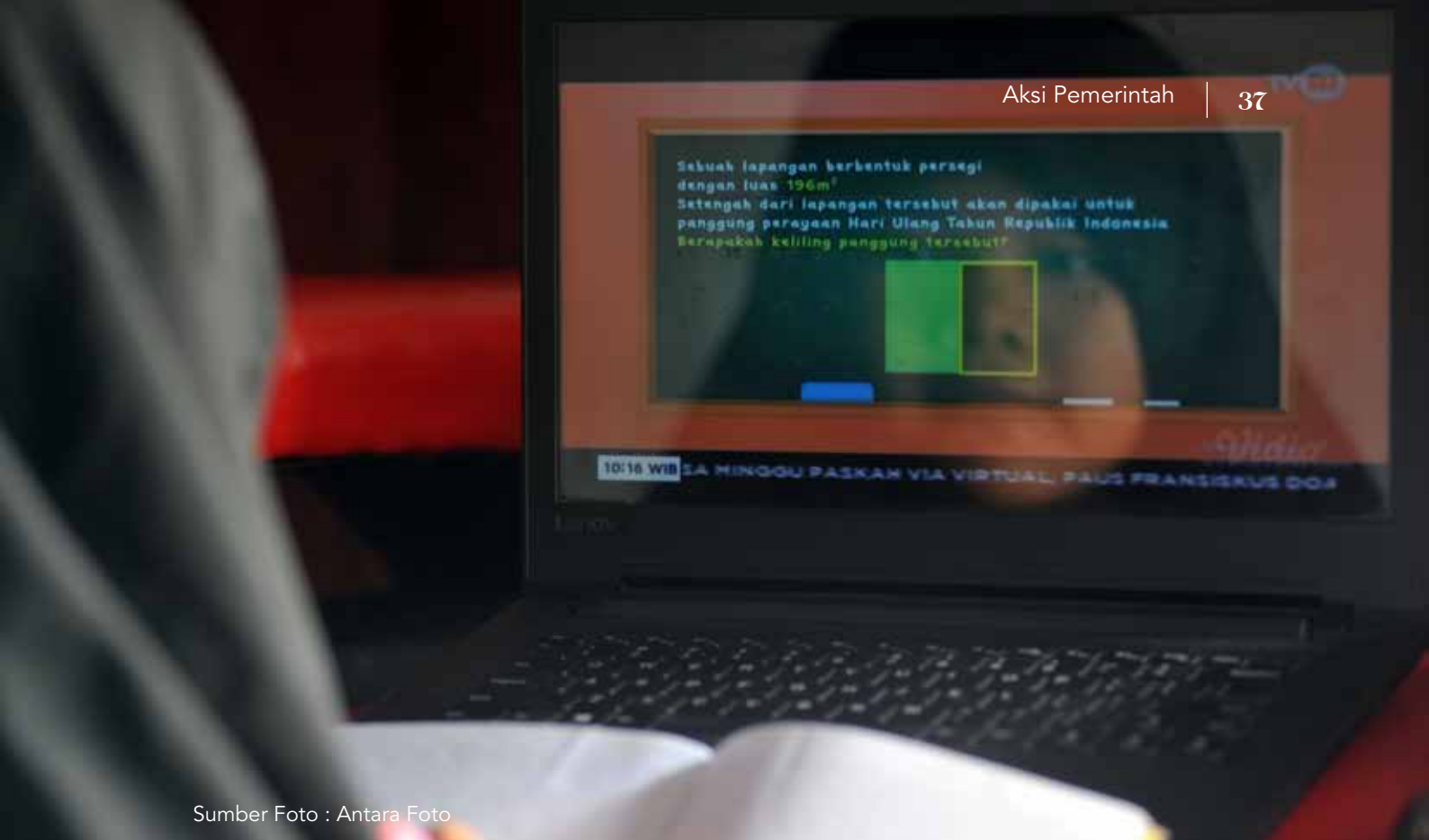
Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut.

Kemendikbud.go.id

1

Menurut Mendikbud, konten pembelajaran dalam program Belajar dari Rumah akan fokus pada literasi, numerasi, dan penumbuhan budi pekerti atau pendidikan karakter. Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama lembaga pemerintah yang independen untuk mengkaji kualitas program Belajar dari Rumah, seperti mengukur apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Mendikbud juga menuturkan, gotong royong menjadi kunci dalam memfasilitasi anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal pembelajaran seperti membuat konten edukatif, *edutainment*, atau *platform* teknologi, baik dengan mitra yang berada di Indonesia maupun mancanegara.



Sumber Foto : Antara Foto

Dalam konferensi video yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan lebih detail mengenai program Belajar dari Rumah di TVRI. "Jadwal di hari Senin hingga Jumat digunakan untuk pembelajaran dengan total durasi tiga jam per hari untuk semua tayangan" katanya.

"Jadi masing-masing ada setengah jam. Setengah jam untuk PAUD, setengah jam untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, setengah jam untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, dan setengah jam masing-masing untuk SMP, SMA, dan parenting," tutur Hilmar.

Dirjen Hilmar mengatakan bahwa materi program diambil dari berbagai sumber. Sebagian besar sudah diproduksi Kemendikbud sebelumnya seperti dari TV Edukasi atau produksi konten unit kerja lain. Ada juga sumber materi dari luar Kemendikbud, yakni Jalan Sesama (Sesame Street) untuk jenjang PAUD.

Hilmar menuturkan, pada akhir pekan, yakni pada Sabtu dan Minggu, ada durasi tiga jam khusus untuk program kebudayaan, antara lain gelar wicara (*talkshow*), *podcast*, kesenian, dan *magazine* tentang perkembangan budaya dari seluruh Indonesia. Lalu di malam hari ada pemutaran film Indonesia dengan pilihan berbagai genre, seperti film anak, drama, dan dokumenter.

Dirjen Hilmar mengatakan Kemendikbud akan menyiapkan 720 episode untuk penayangan program Belajar dari Rumah selama 90 hari di TVRI. Saat ini Kemendikbud sudah menyiapkan tayangan untuk dua minggu pertama, sambil memproduksi untuk tayangan di minggu-minggu berikutnya.

AKSI KEMENDIKBUD

Kemendikbud

Kembangkan Aplikasi RECON

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengembangkan sebuah program dalam jaringan (daring) untuk memfasilitasi pelibatan publik dalam penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, yang diberi nama Relawan Covid-19 Nasional (RECON). Platform berbasis web ini menjadi media monitoring dan evaluasi bagi program relawan kemanusiaan Ditjen Dikti, serta membantu kegiatan preventif dan promotif penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi ini. Semoga semakin memudahkan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini, serta bagi para relawan dan pembimbingnya untuk melakukan tugas-tugasnya dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19," kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Jakarta (13/04/2020).

Sumber Berita :

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-luncurkan-aplikasi-relawan-covid19-nasional-recon>

Sumber Foto : Antara Foto



Sumber Foto : Antara Foto

Platform RECON menjadi sangat penting karena menghubungkan kerja berbagai relawan kemanusiaan Ditjen Dikti secara nasional dari masing-masing wilayah tugas. "Semangat gotong royong, kemampuan kita untuk berkolaborasi, mengesampingkan berbagai macam perbedaan dan mengedepankan tujuan bersama untuk melawan Covid-19, akan sangat menentukan seberapa cepat kita bisa melalui masa sulit ini," tambah Mendikbud.

Plt. Dirjen Dikti, Nizam menjelaskan RECON didesain sebagai media manajemen relawan Covid-19, terutama relawan mahasiswa kesehatan yang sudah tergabung. RECON juga berfungsi memfasilitasi relawan untuk dapat memberikan layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan secara daring kepada masyarakat.

Platform ini juga dapat memfasilitasi kegiatan *tracing/tracking* Orang Dalam Pemantauan (ODP), konsultasi dan pendampingan tenaga medis, serta menjadi media untuk meningkatkan edukasi publik terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh para

relawan mahasiswa kesehatan dan para dokter sebagai *case manager*.

"Implementasi *platform* ini akan lebih banyak berada di Fakultas Kedokteran yang terhubung di dalam Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia, dan adik-adik mahasiswa yang terkoordinasi melalui Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia," jelas Nizam pada saat telekonferensi peluncuran *platform online* RECON.

Lebih lanjut Nizam menjelaskan bahwa *platform* ini akan terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Dikti. "Sampai saat ini juga sedang dalam proses diintegrasikan dengan aplikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga manfaatnya nanti akan lebih dirasakan masyarakat secara luas," katanya. RECON dapat diakses melalui tautan :

<https://relawan.kemdikbud.go.id>

AKSI KEMENAG

Imbauan Ibadah di Rumah

dan Dukungan Pemuka Lintas Agama

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan COVID19 sebagai pandemi karena telah menyebar ke beberapa negara, hampir semua umat beragama dari seluruh penjuru dunia terpaksa harus membatasi aktivitas beribadah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Meskipun dari berbagai kalangan terjadi pro-kontra, tindakan pembatasan aktivitas beribadah di tempat ibadah tujuannya untuk menghindari kerumunan agar tidak terjadi penyebaran wabah Covid-19. Indonesia; salah satu negara yang di dalamnya hidup dalam kerukunan umat beragama juga melakukan tindakan yang sama sejak pandemi ini terkonfirmasi positif awal Maret lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan tentang ibadah di rumah yang berlaku kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Ibadah di rumah merupakan salah satu imbauan pemerintah selain bekerja dan belajar atau *Work from Home* (WFH). Artinya, ketika WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis sebagai upaya pengendalian, maka sudah sejatinya kita melihat bencana wabah ini secara serius dan sungguh-sungguh untuk mencegahnya.



Memang, menghadapi kondisi seperti ini bukan hal yang mudah, apalagi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan di tahun 2020 diperingati saat negeri ini sedang berjuang melawan pandemi COVID19. Selama bulan Maret, ada peringatan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 22 dan Hari Raya Nyepi tanggal 25. Kemudian Hari Paskah yang dirayakan umat Kristiani pada tanggal 10 April. Di akhir bulan April umat Muslim memasuki Bulan Suci Ramadhan selama satu bulan penuh dan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di akhir Mei nanti, juga ada Hari Waisak tanggal 7 Mei dan Kenaikan Isa Almasih tanggal 21 Mei.

Setidaknya, selama periode Maret hingga Mei, peringatan hari-hari besar keagamaan di atas dirayakan secara berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita tidak menginginkan situasi seperti ini, hanya saja yang kita tahu bersama, wabah COVID19 menjadi ancaman bagi semua orang; tidak terbatas negara, suku, ras dan antargolongan. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang didukung oleh pandangan dari pemuka agama untuk mencegah penyebarannya, sudah menjadi

keajiban setiap dari kita untuk kemudian mematuhi. Sebab, imbauan pelaksanaan ibadah dari Kementerian Agama berlaku untuk semua masyarakat Indonesia.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Buddha masing-masing telah mengeluarkan imbauan pencegahan COVID19. Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah.

Dalam Surat Edaran tersebut, Menteri Agama meminta kepada seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Agama untuk proaktif melakukan sosialisasi dan membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah seluruh Indonesia. Imbauan tersebut sebagai upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan rumah ibadah memberlakukan protokol penanganan pencegahan COVID19.

Pandangan Pemuka Agama

Upaya menekan penyebaran pandemi virus Corona, pemerintah tentunya tidak bekerja sendiri. Dalam situasi darurat seperti ini, Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemuka agama yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi umatnya. Kita patut bersyukur bahwa selama masa darurat ini, kebijakan dan imbauan dari pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari lima pemuka agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dukungan ini semakin memperkuat bangsa ini untuk memutus mata rantai virus Corona SARS-COV-2 penyebab penyakit COVID19.

Pernyataan resmi dari perwakilan pemuka agama yang disiarkan secara *live streaming* di kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 28 Maret 2020, semuanya sepakat untuk mengimbau masyarakat agar semakin meningkatkan ibadah lebih dari hari biasanya, mereka juga menegaskan kepada umat masing-masing untuk beribadah di rumah dalam keadaan darurat sebagai upaya bersama mencegah COVID19. Lalu apa saja bentuk dukungan dan pernyataan resmi perwakilan pemuka agama tentang imbauan beribadah di rumah selama masa darurat pandemi?

Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, MUI menekankan 11 poin di dalamnya. Secara singkat, beberapa poin dari fatwa tersebut menganjurkan setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan, menjaga dan mengisolasi diri bagi yang terpapar COVID19, shalat Jum'at diganti dengan shalat Zuhur di tempat kediaman (rumah). Kemudian, haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu atau rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.



Selain itu, fatwa MUI juga menekankan orang yang berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Fatwa MUI itu juga didukung oleh para pendakwa/ustaz kondang seperti Ustaz Aa Gym, Ustaz Abdul Somad, ustaz Yusuf Mansur serta sejumlah ustaz lainnya.

Kedua, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI). Dikutip dari laman resmi pgi.or.id, salah satu imbauan tertanggal 16 Maret 2020, MPH-PGI mengimbau agar dari tempat masing-masing (rumah) untuk memanjatkan doa agar dikaruniai kesehatan dan ketabahan menghadapi masalah bersama yang sedang dihadapi saat ini, serta mendoakan pemerintah agar diberi hikmat dan kemampuan dalam memimpin bangsa ini keluar dari wabah COVID19. MPH-PGI juga mengimbau para Pimpinan Gereja untuk mengembangkan bentuk-bentuk peribadahan yang dapat menjangkau umat di rumah masing-masing, melalui alat bantu media sosial dan perkembangan teknologi digital, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing.



Ketiga, Caritas Indonesia – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Dikutip dari berbagai sumber, ER-DRR Caritas Indonesia KWI Rudy Raka mengatakan, menindaklanjuti imbauan pemerintah tentang ibadah di rumah di masa darurat Corona, KWI telah meminta umat Katolik untuk mengikuti imbauan, baik dari pemerintah maupun petunjuk dari para uskup untuk beribadah di rumah. “Para uskup sudah mengeluarkan petunjuk supaya ditaati, dipatuhi dengan penuh disiplin oleh seluruh umat beriman mengenai perayaan liturgi. Terlebih, yang pertama, seluruh umat diharapkan mengikuti perayaan gereja yang tetap dirayakan para uskup dan imam tanpa hadir bersama,” demikian pernyataan Rudy Raka.

Keempat, dukungan lain datang dari Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi). Melalui pernyataan Sekretaris Permabudhi, Winarso, sejak awal Maret 2020 telah memberlakukan larangan untuk beribadah di Wihara sebagai bentuk dukungan memutus mata rantai penyebaran COVID19. Umat Buddha di Indonesia juga mendukung imbauan pemerintah tentang *social distancing*, serta mematuhi protokol kesehatan lainnya, seperti menjaga jarak antar sesama, tidak melakukan aktifitas dengan melibatkan banyak orang atau berkerumun.



Kelima, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Mewakili pemuka agama Hindu, Ketua Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI Pusat Nyoman Suarthanu ikut menyerukan umat beragama di Indonesia khususnya umat Hindu mengambil langkah-langkah antisipasi pencegahan COVID19 serta mematuhi upaya demi upaya dari pemerintah, khususnya dalam protokol peribadatan. Bahkan, PHDI pun telah mengeluarkan surat edaran di awal Maret untuk mengimbau umat Hindu Indonesia ikut melawan penyebaran COVID19.

Bentuk dukungan penuh dari kalangan pemuka agama kita harapkan semakin memperkuat pemerintah bersama masyarakat untuk secara bersama-sama menghadapi pandemi ini. Dalam hal ini, jangan lagi ada yang saling menyalahkan, memperdebatkan hal-hal yang sifatnya memperlambat upaya bersama melawan COVID19.

Marilah kita saling bergandengan tangan, bahu-membahu, mengedepankan sikap gotong royong. Karena Ibu Pertiwi memanggil seluruh lapisan anak bangsa dalam situasi yang sulit saat ini. Kita harapkan bersama selama masa darurat pandemi, Indonesia mampu melewatinya dengan baik. Semoga tidak ada lagi jatuh korban positif COVID19 hingga sampai memakan korban jiwa. Oleh karena itu, kita harus mengambil bagian dari berbagai kebijakan dan imbauan pemerintah. Setidaknya, dengan ikut mematuhi maka kita telah berkontribusi memutus mata rantai COVID19. Semoga negeriku, negerimu dan negeri kita semua ini kembali pulih, Aamiin.

kartu
prakerja

dan Optimisme Menkominfo atas Perekonomian Indonesia

Jakarta, Kominfo – Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Namun, Menteri Johnny optimistis ekonomi Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah.

“Bisa saja membuat lapangan pekerjaan semakin terbatas dan ada yang dirumahkan. Lalu tekanan dari munculnya tenaga kerja baru, begitu besarnya. Kita harapkan memang kalau bisa dilakukan sendiri bagus sekali. Tetapi, pada saat di mana ada tekanan penerimaan dan daya beli rakyat, maka digunakan stimulus melalui APBN,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan mengenai kerja sama pemerintah dengan sejumlah *platform digital* melalui Program Kartu Prakerja dalam tayangan TVRI di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Menurut Menteri Kominfo pemerintah ingin memastikan jangan sampai ada rakyat yang tidak terbantuan, sehingga perlu



Sumber Foto : Antara Foto

diperhatikan bagi pemuda-pemuda yang ingin memasuki lapangan pekerjaan namun kebutuhan atau keahliannya belum *link and match* dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

“Di situlah diisi dengan Kartu Prakerja, dengan pendidikan-pendidikan teraman yang nantinya begitu selesai bisa langsung bekerja dengan memenuhi kebutuhan, keahlian, di lapangan pekerjaan itu sendiri,” jelasnya.

Dukungan Kementerian Kominfo

Program Kartu Prakerja didukung penuh oleh berbagai kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kominfo, di bawah koordinasi langsung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Kemenko Perekonomian

memiliki kewenangan dalam menentukan aplikasi yang digunakan dalam program Kartu Prakerja tersebut. Sementara Kementerian Kominfo berperan dalam mendukung kesiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

“Peran Kominfo dalam mendukung program Kartu Prakerja, tentu menyiapkan infrastruktur jaringannya bersama operator seluler agar terjaga dengan baik,” jelas Menteri Johnny.

Selain itu Kementerian Kominfo juga memastikan agar *bandwidth* hingga spektrum frekuensi terjaga dan aman, sehingga tidak terjadi gangguan (*interference*). “Kominfo mengawasi jaringannya, transmisinya. Kalau kapasitas server, tentu itu di *platform digital*. Kita harapkan juga *platform digital* juga menjaga baik-baik ke servernya,” paparnya.

Demikian halnya dengan dukungan perusahaan-perusahaan seluler. Menteri Johnny meminta operator seluler turut memperhatikan kapasitas server agar tetap terjaga, sehingga diharapkan trafiknya dapat diatur dengan baik dan tidak terganggu.

“Kita tidak bisa perkirakan, tiba-tiba *traffic*-nya naik begitu banyak di waktu yang bersamaan. Ini kan bisa mengganggu kelancaran aplikasi-aplikasi bagi warga negara kita (rakyat) yang ingin mendaftar, mengambil bagian dalam Kartu Prakerja itu,” jelasnya.



KOMINFO Mendukung dengan menyiapkan infrastruktur jaringan bersama operator seluler agar terjaga dengan baik. Memastikan bandwidth hingga spektrum frekuensi terjaga dan aman





Berikan Stimulus

Menjawab kritik terkait efektivitas pelatihan dalam program Kartu Prakerja, Menteri Johnny menjelaskan, tentu sangat bagus jika pelatihan bisa dilakukan sendiri (oleh masyarakat, red). Namun di masa seperti ini, dengan adanya tekanan penerimaan dan daya beli rakyat, maka diperlukan stimulus melalui APBN.

“Karena dampak dari Covid-19 ini bisa saja membuat lapangan pekerjaan menjadi semakin terbatas, ada yang di rumahkan. Lalu tekanan dari munculnya tenaga kerja baru begitu besarnya dan lapangan pekerjaannya selama masa Covid-19 ini terbatas,” jelasnya.

Namun Menteri Johnny turut mengingatkan bahwa langkah pemerintah memberikan stimulus dan memfasilitasi tetap membutuhkan upaya kesungguhan dari masyarakat. “Dari para pekerjanya sendiri juga harus sungguh-sungguh belajarnya, supaya menyerap ilmunya dengan baik. Sehingga nanti, pada saat lapangan pekerjaan itu tersedia, bisa langsung *link and match* dengan pekerjaan.”

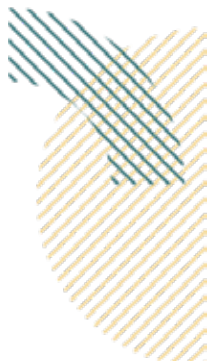
Menteri Johnny menambahkan, pemerintah pun terus berkomunikasi dengan industri terkait penyerapan tenaga kerja. Namun dalam situasi saat ini, IMF dan Bank dunia memprediksi terjadi pelemahan ekonomi

dunia yang memungkinkan di bawah nol persen. “Jika pertumbuhannya negatif, itu artinya resesi dunia. Kalau terjadi resesi, maka akan memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru,” jelas Menkominfo.

Hal ini pula yang ditekankan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet. “Presiden Jokowi pada Rapat Kabinet menekankan betul-betul untuk menjalankan seluruh konsep-konsep, memastikan jangan sampai kita terjebak dalam situasi ekonomi global,” imbuhnya.



PEKERJANYA JUGA HARUS SINGGUH-SINGGUH BELAJARNYA, MENYERAP ILMU DENGAN BAIK. SEHINGGA NANTI, PADA SAAT LAPANGAN PEKERJAAN TERSEDIA, BISA LANGSUNG *LINK AND MATCH* DENGAN PEKERJAAN





Sumber Foto : Unsplash

Hadirkan Dampak positif

Menteri Kominfo meyakini perkembangan ekonomi Indonesia 2020 masih tetap positif meski adanya tekanan dari berbagai sisi, termasuk tekanan fiskal, dan tekanan lapangan pekerjaan baru.

"Mari kita gunakan semua kemampuan agar tidak sampai resesi. Tekanan kita masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang ada di negara lain, kita harus jaga perekonomian kita," tegasnya.



Menteri Johnny turut berharap, momentum sekarang ini dapat dimanfaatkan sebagai percepatan transformasi digital. "Sekarang ini, dengan tidak perlu jalan, tidak perlu bertemu secara fisik, pertemuan bisa dilakukan melalui *online*, belajar bisa dengan *online*, dan banyak kegiatan masyarakat bahkan kesehatan secara *online*, maka itu tentu akan membuat biaya hidup rata-rata kita akan semakin lebih murah, dan semakin kompetitif," terangnya.

Hal positif lainnya yang bisa dilihat adalah bagaimana kondisi saat ini bisa memberikan gaya hidup baru, efisiensi baru setelah pandemi COVID-19 nantinya usai. (hm.ys/m)

“

Hal-hal positif yang saat ini bisa kita ambil dari situasi yang bisa kita teruskan setelah Covid-19, itu akan memberikan banyak manfaat bagi kita ya, termasuk bagi generasi muda. Semoga ekonomi Indonesia juga bisa semakin meningkat.

”



Satu Bulan Gerak Bersama Gugus Tugas COVID-19

Sudah satu bulan sejak Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 pada 13 Maret 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Satu bulan pula Gugus Tugas COVID-19 bergerak menangani penyebaran virus corona di Indonesia. Berkoordinasi, menentukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pada Selasa, 14 April lalu, Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Doni Monardo menggelar konferensi pers virtual "Progress Report Satu Bulan Gugus Tugas Bekerja". Ketua Gugus Tugas tersebut menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam satu bulan terakhir.

Sumber Foto : Antara Foto

Melengkapi Alat Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Medis

Gugus Tugas memastikan alat keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga medis tercukupi agar terlindungi dari bahaya Covid-19. Sebanyak 725.000 APD (Alat Pelindung Diri), 13 juta masker bedah, dan 150.000 masker N-95 telah didistribusikan. Selain itu Gugus Tugas dibantu sejumlah pihak terus mengupayakan produksi APD dan alat bantu pernapasan yang bersertifikasi WHO.

“Saat ini, tim ahli dari Gugus Tugas dibantu oleh peneliti, periset dari

berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha, sedang berupaya memproduksi APD menggunakan komponen lokal yang bersertifikasi WHO. Ke depan juga diupayakan memproduksi ventilator (alat bantu pernapasan),” jelas Doni Monardo.

Penambahan Unit dan Peningkatan Kemampuan Laboratorium

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga terus meningkatkan kemampuan laboratorium untuk memeriksa spesimen yang menyebabkan wabah Covid-19.

“Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Ristek/ Badan Riset Inovasi Nasional terus meningkatkan kemampuan laboratorium. Semula 3 unit menjadi 12, lalu 25 unit, dan saat ini sedang menuju 52 unit. Terus diupayakan, kita harapkan ada 78 unit laboratorium yang tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh tanah air,” jelas Doni.

Selain itu Gugus Tugas juga telah mendistribusikan 800.000 *rapid test* ke seluruh provinsi di Indonesia.

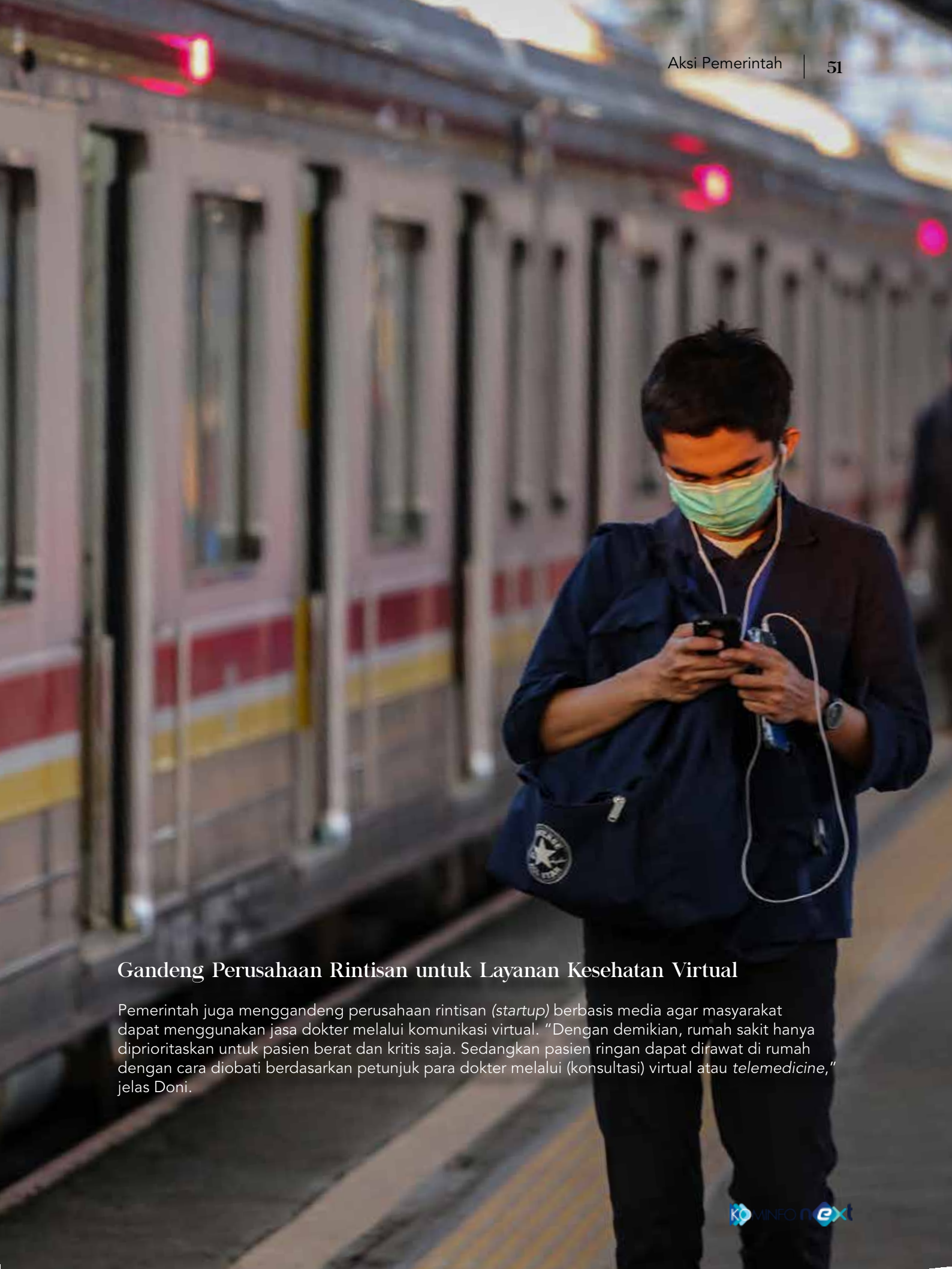
Sementara pada Kamis (16/04/2020), Gugus Tugas bekerja sama dengan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menghadirkan layanan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) virus corona secara gratis. “Hari ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat dukungan dari Kalbe Farma yang telah menyediakan laboratorium pemeriksaan PCR untuk penderita Covid-19, dengan kapasitas 8.000 tes per bulan. Ini gratis untuk rumah sakit rujukan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/04/2020).



Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit

Didukung oleh Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gugus Tugas terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah, TNI/Polri, BUMN, maupun swasta. "Saat ini 635 rumah sakit rujukan telah siap, dengan daya tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasien berat dan kritis," jelasnya.

Sementara untuk pasien kategori sedang, telah disiapkan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dengan kapasitas 2.000 pasien, rumah sakit darurat di Pulau Galang dengan kapasitas 400 pasien, dan tempat observasi di Natuna.



Gandeng Perusahaan Rintisan untuk Layanan Kesehatan Virtual

Pemerintah juga menggandeng perusahaan rintisan (*startup*) berbasis media agar masyarakat dapat menggunakan jasa dokter melalui komunikasi virtual. "Dengan demikian, rumah sakit hanya diprioritaskan untuk pasien berat dan kritis saja. Sedangkan pasien ringan dapat dirawat di rumah dengan cara diobati berdasarkan petunjuk para dokter melalui (konsultasi) virtual atau *telemedicine*," jelas Doni.

Strategi Penanganan Covid-19

Doni Monardo turut menjabarkan strategi tim dalam menjalankan tugas-tugasnya menangani pandemi COVID-19. Strategi tersebut antara lain mengatur keseimbangan antara penanganan medis dan upaya pencegahan dengan memutus mata rantai penularan, melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.

Selain PSBB, pemerintah juga menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. "Percepatan penanganan juga dilakukan dengan upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi ancaman Covid-19. Mengajak seluruh komponen masyarakat agar memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat yang positif terpapar COVID-19, atau Orang Tanpa Gejala (OTG)," ujar Doni.

Menurutnya penting bagi masyarakat untuk memahami pemisahan kelompok tersebut, mengingat OTG dapat bisa menjadi penyebar maut bagi kelompok-kelompok rentan, yaitu masyarakat usia lanjut dan penderita penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, kanker, diabetes, asma, hepatitis, dan penyakit berat lainnya.

“

Kita juga lakukan kampanye meningkatkan imunitas tubuh. Makan makanan bergizi, minum vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur, hati yang gembira, dan tidak panik.





Bantu Salurkan Donasi Masyarakat

Dalam konferensi pers “Progress Report 1 Bulan Gugus Tugas Bekerja” tersebut, Kepala BNPB turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada para donatur dari berbagai lapisan masyarakat dari dalam maupun luar negeri.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para donatur baik dalam maupun luar negeri yang telah memberikan dukungan dan bantuannya. Kami memprioritaskan untuk memberikan santunan kepada petugas medis yang telah gugur. Mereka adalah pahlawan kita, pahlawan kemanusiaan” ujar Doni.

Donasi yang diterima diprioritaskan untuk santunan bagi para tenaga medis yang gugur dalam “perang” melawan pandemi COVID-19 ini, dengan rincian Rp250 juta untuk dokter, Rp150 juta untuk perawat, dan Rp100 juta untuk tenaga medis lainnya.

Tentang Gugus Tugas

Dibentuk pada 13 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, Gugus Tugas bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang Kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi K/L dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambil kebijakan operasional, serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons COVID-19.

Gugus Tugas COVID-19 terdiri dari 12 unsur, yaitu Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Kepolisian, dan unsur Kantor Staf Presiden.

12 unsur tersebut dikomandoi langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Ketua Gugus Tugas, dengan dibantu Wakil Ketua I, Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan Wakil Ketua 2, Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber :

Youtube BNPB <https://www.youtube.com/watch?v=AtLqWDQ0qvo>

<https://bnpb.go.id/berita/gugus-tugas-produksi-apd-berbahan-lokal-sertifikasi-who>

<https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita>

GAS PERCEPA ANAN COVID-19

#SiapUntukSelama
anaUrusanBersam



Doni Monardo

Sang Jenderal Humanis, dari Militer Hingga Lingkungan

Sosok Doni Monardo kini tengah menjadi sorotan publik. Dengan gaya khasnya berkemeja putih dan rompi coklat berlogo BNPB di saku kanan dan nama DONI di saku kiri, ia acap kali muncul dalam konferensi pers terkait laporan kondisi terbaru penanganan COVID-19 di Indonesia.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilantik pada 9 Januari 2020 lalu. Dua bulan menjabat, Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Ketua Gugus Tugas, bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memimpin tim lintas kementerian/lembaga dan sektor untuk mengatasi penyebaran virus penyebab COVID-19.



Letjen Doni Monardo merupakan Kepala BNPB pertama yang berlatar belakang militer. Begitu lulus SMA Negeri 1 Padang, Doni masuk Akademi Militer di tahun 1985, dan melanjutkan pendidikan militernya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1999. Pendidikan militer terakhir yang ia ambil adalah pada tahun 2012 di Lembaga Ketahanan Nasional.

Kisah Suksesnya, Dari Timor Timur Hingga Somalia

Karir militernya tergolong cemerlang. Begitu lulus Akmil di tahun 1985, ia langsung bergabung dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan pernah ditugaskan di wilayah konflik Timor Timur dan Aceh.

Saat bertugas di wilayah darurat operasi militer Timor Timur tersebut, Doni menjabat sebagai Komandan Satuan (Dansat) Intel Kopassus. Yang menarik, dilansir dari Liputan6.com, mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, pernah menyebut Doni selalu menggunakan pendekatan kemanusiaan saat menjalankan operasi di negaranya.

“

Jangan kita buang-buang energi dengan terus berdebat, mari kita bersama-sama menyelamatkan seluruh masyarakat.

”



Pendekatan ini pun ia gunakan saat berhadapan dengan jaringan bawah tanah Timor Leste yang terkenal berbahaya, Klandestin. Letjen Doni juga pernah mendatangi keluarga-keluarga simpatisan Falintil, sayap politik militer yang paling disegani saat itu, dengan membawa beras, makanan, dan baju.

Ia juga dikenal tidak suka menggunakan senjata api. Baku tembak hanya dilakukan sebagai upaya membela diri jika lawan menyerang terlebih dahulu. Langkah-langkah yang ia ambil tidak biasa, namun justru membuat masyarakat Timor Timur simpatik dengan pendekatan kemanusiaan yang ia lakukan. Beberapa masyarakat yang simpatik pernah sampai memberikan informasi-informasi penting kepadanya.

Pencapaian lain sepanjang karirnya adalah menyelesaikan misi pembebasan kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang dibajak oleh perompak pada 16 Maret 2011 di perairan Somalia, Afrika Timur. Kapal berbobot 8.911 ton bermuatan ferro nikel tersebut dibajak dalam pelayarannya dari Sulawesi menuju Rotterdam, Belanda.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Maret 2011 membentuk satuan tugas antiteror pembebasan kapal tersebut, dan menunjuk Doni sebagai Wakil Komando. Setelah melakukan serangkaian pengintaian dan negosiasi, Doni sukses memimpin operasi militer tersebut. Bahkan tim pembebasan kapal mampu melakukan pengejaran perompak ke garis pantai Somalia dan membebaskan para sandera.

Pemerhati Isu Lingkungan

Letjen Doni Monardo ternyata juga merupakan sosok yang tertarik dengan isu lingkungan. Saat menjabat sebagai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Sulawesi Selatan, ia melakukan upaya penghijauan di sejumlah lahan tandus, termasuk di kawasan Bandar Udara Hasanuddin, Makassar.

Lalu saat menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Pangdam Siliwangi), ia turut menggagas Citarum Harum, program rehabilitasi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang telah lama tercemar.

Sumber :

<http://ksp.go.id/kantor-staf-presiden-dukung-penuh-rehabilitasi-sungai-citarum/>

<https://www.liputan6.com/news/read/3861339/profil-doni-monardo-dan-jejak-karier-di-militer-hingga-jadi-calon-kepala-bnpp>

<https://www.liputan6.com/news/read/3877955/cerita-kepala-bnpp-doni-monardo-dan-xanana-gusmao-dulu-musuh-sekarang-teman>

<https://katadata.co.id/berita/2020/03/20/doni-monardo-jenderal-bintang-tiga-yang-pimpin-perang-melawan-corona>

<https://www.beritasatu.com/nasional/625623-ketika-kepala-gugus-tugas-covid19-doni-monardo-memakai-seragam-tni>

PROFIL

Doni Monardo



Riwayat Jabatan

- Danyon-11 Grup-1/Kopassus
- Danyonif 900/Raider (1999-2001)
- Dandenma Paspampres
- Waasops Danpaspampres
- Danbrigif Linud 3/Tri Budi Sakti (2008)
- Dan Grup A Paspampres (2008-2010)
- Danrem 061/Surya Kencana (2010-2011)
- Wadanjen Kopassus (2011-2012)
- Danpaspampres (2012-2014)
- Danjen Kopassus (2014-2015)
- Pangdam XVI/Pattimura (2015-2017)
- Pangdam III/Siliwangi (2017-2018)
- Sesjen Wantannas (2018-2020)
- Kepala BNPB (Januari 2020 – sekarang)

Riwayat Penghargaan

- Bintang Jasa Utama
- Bintang Yudha Dharma Pratama
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
- Bintang Yudha Dharma Nararya
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- SL. Dharma Bantala
- SL. Kesetiaan XXIV
- SL. Kesetiaan XVI
- SL. Kesetiaan VIII
- SL. Dwidja Sista
- SL. Dharma Nusa
- SL. Wira Siaga
- SL. Ksatria Yudha
- SL. Wira Karya



Dukungan Sektor Kominfo Lawan Covid-19

Perang lawan Corona. Mungkin kalimat ini tepat untuk menerjemahkan kondisi dunia saat ini, khususnya bagi negara-negara yang terkonfirmasi kasus positif virus Corona SARS-COV-2 penyebab penyakit COVID19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data per 22 April 2020, sebanyak 213 negara dinyatakan terjangkit dengan kasus positif secara global mencapai 2.436.743 orang dan jumlah kematian total 165.310. Sedangkan di Indonesia, kasus positif terkonfirmasi sebanyak 7.418, sembuh 913 dan 635 meninggal. Melihat kondisi seperti ini tentunya mengkhawatirkan, akan tetapi kerja keras harus tetap tergelorakan demi memutus mata rantai penyebarannya.

Banyak aspek yang kemudian menjadi perhatian bersama; baik pemerintah, masyarakat hingga berbagai ekosistem yang terlibat secara sukarela sebagai relawan COVID19. Sehingga, upaya memutus mata

rantai COVID19 tidak saja menyoal bagaimana kita bisa mengurangi jumlah kasus positif, tetapi juga memulihkan kembali aspek-aspek yang terkena dampak, misalnya dampak ekonomi, pendidikan, pariwisata dan aspek lainnya. Semua itu akan berjalan normal kembali jika hal-hal mendasar seperti saluran informasi yang baik dan benar menjadi tameng/penyelamat atau kekuatan dalam melawan mewabahnya virus Corona itu sendiri. Mengapa demikian? Karena keresahan dan kepanikan kita akan sebuah informasi justru semakin memperpanjang rasa ketakutan kita akan wabah ini.

Jauh sebelum Indonesia dinyatakan positif Corona pada 2 Maret 2020, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menemukan sejumlah konten disinformasi dan hoaks yang tersebar di berbagai kanal media massa. Saat Virus Corona menyerang Tiongkok pada akhir tahun 2019, konten hoaks sudah tersebar di Indonesia akhir Januari 2020. Padahal pada saat itu, virus Corona belum masuk di Indonesia.

Menyikapi akan maraknya persebaran konten hoaks, pemerintah kemudian membentuk pusat informasi dan komunikasi penanganan dampak Virus Corona.

Kemenkominfo memiliki peran penting dalam kondisi tersebut. Selain sebagai bagian dari tim Gugus Tugas, Kemenkominfo juga menjalankan fungsi sebagai Government Public Relation (GPR) atau Humas Pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kemudian mengambil sikap tegas dalam menekan jumlah persebaran



hoaks. Tidak sampai di situ, Kementerian Kominfo bersama mitra kerjanya di bidang informasi dan telekomunikasi juga memiliki banyak andil dalam upaya memutus mata rantai COVID19.

Guna meminimalisir konten-konten hoaks di berbagai platform digital, membangun literasi digital dan penindakan hukum terus dilakukan. Dalam pandangan Menkominfo, pencegahan terkait sikap dan cara berpikir masyarakat tentang Virus Corona harus diberikan melalui edukasi dan literasi secara berkala. Upaya mencegah informasi hoaks merupakan bagian dari membangun narasi positif yang dilakukan pemerintah hingga saat ini.

Gandeng Platform Digital

Kementerian Kominfo menggandeng sejumlah platform digital yang merupakan mitra kerja pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dengan menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menggandeng sejumlah pihak untuk ikut melawan COVID19. Bersama mitra kerjanya, Menkominfo bersama jajarannya telah

mengeluarkan beberapa kebijakan pendukung, diantaranya menghadirkan layanan WhatsApp *Chatbot*, Aplikasi 10 Rumah Aman dan Aplikasi PeduliLindungi.

WhatsApp Chatbot COVID-19

WhatsApp *Chatbot* merupakan fitur layanan pesan instan untuk mengetahui perkembangan terbaru soal COVID19 secara global dan nasional. Kehadiran WhatsApp *Chatbot* dengan nama akun covid19.go.id ini merupakan kerja sama antara Kementerian Kominfo, WhatsApp (Facebook Group) dan Telkom Group. Masyarakat sebagai pengguna bisa mengaksesnya secara gratis dengan mengirimkan pesan WA ke nomor 081133399000 atau klik melalui tautan <https://wa.me/6281133399000>.

Menurut Menkominfo, masyarakat dapat berinteraksi dengan akun *chat* resmi pemerintah tersebut untuk memperoleh informasi secara interaktif melalui *chatbot* yang kontennya disediakan oleh BNPB dan Kemenkes RI. WhatsApp *Chatbot* Covid19.go.id sendiri memiliki 7 fitur informasi yang bisa dipilih melalui menu, antara lain Kabar Covid-19 terkini di Indonesia, sebenarnya apa sih Covid-19 itu?, Apa saja gejala Covid-19, bagaimana cara melindungi diri?, bagaimana cara melindungi orang lain, masker perlu gak sih? dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19.

WhatsApp sendiri memberikan komitmen kebijakan khusus bagi Indonesia untuk dapat menyalurkan pesan WhatsApp *blast* terkait pandemi Covid-19. WhatsApp mengklaim, kebijakan ini hanya diberikan secara eksklusif kepada dua negara, yakni Indonesia dan Singapura.

Aplikasi 10 Rumah Aman

Aplikasi ini merupakan bagian penting dalam memutus mata rantai COVID19. Dengan menggunakan basis teknologi Artificial Intelligence (AI), aplikasi ini dapat membantu kita dan lingkungan sekitar untuk melindungi diri penyebaran wabah tersebut. Dalam peluncurannya, Menkominfo menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengukur suhu tubuhnya sendiri, memeriksa kesehatan secara



mandiri dan memantau daerah atau masyarakat mana yang memiliki potensi penyebaran COVID19 agar dapat menghindari daerah tersebut.

Aplikasi 10 Rumah Aman hasil kolaborasi Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama pelaku digital dan usaha rintisan di Tanah Air. Aplikasi ini juga menjadi pendekatan *online to offline* hasil karya anak negeri sendiri. Sama seperti WhatsApp *Chatbot*, untuk menggunakan aplikasi, masyarakat cukup melalui telepon seluler yang dapat menghubungkan data berbasis peta, lingkungan sekitar, dan juga terhubung dengan platform media sosial.

10 Rumah Aman juga ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat tetap berada di dalam rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, saling mengingatkan dan menjaga agar selalu dalam keadaan sehat dan baik dengan menjaga jarak aman. Kominfo bersama sejumlah startup digital pun menghadirkan *dashboard* untuk pemerintah yang dapat memantau daerah penyebaran Covid-19.



Aplikasi PeduliLindungi

Satu lagi bentuk dukungan sektor Kominfo yang memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melawan pandemi Covid-19, yaitu Aplikasi PeduliLindungi. PeduliLindungi dikembangkan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus melalui perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan lingkungan terdekat. Kita cukup menginstal aplikasi ini, kemudian hidupkan

Bluetooth maka kita sudah ikut berpartisipasi dalam upaya dengan masyarakat lain untuk menghentikan penyebaran COVID19.

Cara kerja aplikasi PeduliLindungi sendiri menggunakan data yang diproduksi oleh *gadget* kita dengan mengaktifkan *Bluetooth* untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika ditemukan ada *gadget* lain di sekitar kita dalam radius *Bluetooth* yang juga terdaftar

menggunakan PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran *id anonym* yang akan direkam oleh *gadget* masing-masing. Lebih jelasnya, aplikasi ini dapat mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID19, atau Orang Dalam Pemantauan (ODP). Oleh karena itu, aplikasi PeduliLindungi menjadi rekomendasi bagi kita untuk membantu mencegah penyebaran COVID19, terutama di daerah-daerah Zona Merah.

Selain beberapa kebijakan di atas, Kementerian Kominfo juga proaktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga dengan hadirnya berbagai upaya dari Kementerian Kominfo dan mitra kerjanya dapat membantu masyarakat dan negeri ini dalam melawan COVID19. Begitupun beberapa kerja sama lain seperti di industri media massa cetak, elektronik dan penyiaran dalam menyampaikan informasi-informasi pemerintah seputar COVID19.

Marilah kita akhiri pandemi virus Corona ini dengan mengajak orang-orang di sekitar kita berpartisipasi dan mengikuti imbauan dari pemerintah. Demi Indonesia. Demi Ibu Pertiwi kita tercinta.

Top 7 HOAKS Corona Bulan April

1 463.285 Pasukan TNI dan Polri di Papua Positif Covid 19 dan Banyak Yang Meninggal Dunia

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang memberikan keterangan bahwa ada 463.285 Orang Anggota TNI dan Polri telah terinfeksi Covid-19. Disebutkan pula bahwa 178 PNS dari TNI dan 55 Orang Pasukan TNI dan POLRI yang bertugas di Tanah Papua telah meninggal dunia akibat infeksi Virus Covid-19..

Faktanya...

Informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki sumber kredibel. Menurut salah satu akun Instagram @gegana_id disebutkan bahwa TNI dan Polri selaku penegak hukum KKB di wilayah Papua tidak ada yang positif Covid-19 maupun meninggal dunia karena Covid-19. Pada kesempatan lain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan ada 1.187 kasus Corona di Mabes TNI. Adapun setelah dilakukan pengecekan, jumlah yang positif terinfeksi Covid-19 ada 55 orang, PDP 190 orang, ODP 873 orang, sembuh ada 54 orang, dan meninggal dunia ada 15 orang. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan klaim yang disampaikan pada unggahan di atas.

2 24 Orang yang Divonis Positif Corona Melarikan Diri dari UGD Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok

Beredar unggahan di media sosial FB yang menyebutkan 24 orang terkena Virus Corona yang melarikan diri dari UGD Puskesmas. Pesan tersebut juga disertai dengan sebuah video petugas medis memakai APD lengkap di depan ambulans yang sedang menghitung jumlah orang yang akan dibawa ambulans Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Faktanya...

Dilansir dari laman data.jakarta.go.id, informasi yang beredar tersebut tidak benar. Dalam video yang disertakan memang benar terdapat mobil ambulans Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun kegiatan yang terekam dalam video merupakan pelaksanaan proses rujukan para jama'ah Masjid Al Muttaqin di RW 1 Sunter Agung ke RS Darurat Wisma Atlet secara bertahap setiap 1 jam karena keterbatasan UGD RS Wisma Atlet.

3 Peneliti Korsel Dokter Kim Woo Joo Temukan Vaksin Covid-19

Beredar artikel yang dimuat oleh sebuah situs daring dengan judul artikel "Selamat Datang Vaksin Covid-19, Terima Kasih Dokter Kim Woo Joo". Dalam artikel tersebut terdapat klaim bahwa peneliti di Korea Selatan menemukan vaksin Covid-19 yang segera bisa digunakan umat manusia di dunia.

Faktanya...

Informasi dalam artikel tersebut tidak benar. Dilansir dari Liputan6.com, klaim yang menyebut peneliti Korea Selatan, Dokter Kim Woo Joo menemukan vaksin adalah tidak benar. Dalam situs South China Morning Post, yang menjadi sumber klaim dari artikel terkait, tidak disebutkan bahwa peneliti Korea Selatan telah menemukan vaksin Covid-19. Yang benar, Dr Kim Woo Joo mengatakan jangka waktu (time frame) pengobatan Covid-19 yang efektif mungkin lebih pendek daripada mengembangkan vaksin. Ia menyebut remdesivir, buatan Gilead Sciences sebagai kandidat obat yang bisa diharapkan. Selain itu, vaksin dan obat adalah dua hal yang berbeda.

4 *Mayat Terpapar Virus Covid-19 Dibuang ke Laut*

Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter bahwa sejumlah Negara membuang jenazah yang terpapar virus Covid-19 ke laut. Informasi dalam Bahasa Inggris itu dilengkapi video mayat orang-orang kulit hitam yang tergeletak di pantai.

Faktanya...

Setelah dilakukan penelusuran, video yang sama pernah diunggah kanal Godspower Oshodin pada Juni 2019. Peristiwa itu sebenarnya terjadi pada tahun 2014. Portal berita Daily Mail pernah memuat foto tentang kejadian yang sama pada 26 Agustus 2014. Disebutkan, mayat imigran asal Afrika itu ditemukan tersapu ke arah pantai, 30 mil sebelah timur Tripoli. Hampir 200 imigran diduga tenggelam setelah berupaya menyeberang ke daratan Eropa dengan sebuah kapal kecil.

5 *Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo*

Telah beredar selebaran digital di media sosial yang berisi informasi terkait dengan peta sebaran Virus Corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Situbondo.

Faktanya...

Faktanya, ditemukan fakta bahwa informasi dalam selebaran tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jatimnow.com, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menjelaskan bahwa Flyer atau selebaran tersebut adalah palsu alias hoaks. Pihaknya hingga saat ini telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

6 *RSD Gunung Jati Tutup karena Petugas IGD Positif Covid-19*

Beredar sebuah pesan berantai Whatsapp berisi informasi yang menyebutkan bahwa RSDGJ (Rumah Sakit Daerah Gunung Jati) Kota Cirebon tidak menerima pasien dan tutup untuk sementara dikarenakan adanya petugas IGD yang positif Covid-19.

Faktanya...

Faktanya, mengutip dari radarcirebon.com, Kasubag Humas Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Arif Wibawa Rumana memastikan kabar yang beredar tersebut adalah tidak benar. Adapun ruang IGD dan HCU memang sempat ditutup sementara waktu karena sedang sterilisasi pada Selasa malam. Setelah itu ruangan dibuka kembali.

7 *Video Warga Keluyuran di Atas Jam 2 Siang Diancam Pukul Rotan saat Penerapan PSBB Bandung Raya*

Beredar video sosialisasi pihak kepolisian mengingatkan warga agar tidak beraktivitas di luar rumah diatas pukul 14.00. Warga yang membandel diancam akan dipukul menggunakan rotan oleh aparat. Video tersebut diklaim untuk penerapan PSBB Bandung Raya.

Faktanya...

Menurut postingan dari akun Instagram Humas Polda Jabar, video yang beredar tersebut terjadi di daerah Sentani Papua. Pembatasan aktivitas warga di sana disebut akan mulai dilakukan pada Senin, 20 April 2020.

Temukan Hoaks Covid-19? Yuk, Abaikan dan Sebar Kabar Baik!

Jakarta, Kominfo – Indonesia, dalam beberapa hari terakhir tidak hanya sedang mengalami pandemi Virus Corona (Covid-19). Negara dengan total penduduk sekitar 262 juta jiwa ini juga terkena wabah hoaks yang bermunculan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, dan Twitter.

Hasil identifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga 20 April 2020 terdapat 562 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di berbagai platform digital.

Jika sebaran dihitung per platform digital, terdapat sebanyak 1.231 hoaks yang ditemukan di Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Pasalnya, satu jenis konten hoaks bisa disebar dalam banyak platform.

Mengutip data yang dipublikasikan akun Instagram Kominfo pada Senin (20/04/2020) tentang sebaran hoaks Covid-19, ditemukan 861 konten hoaks terkait virus corona di Facebook, 352 hoaks di Twitter, 10 hoaks Instagram, dan 8 hoaks di Youtube.

Meski jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, namun kecepatan sebaran informasi dapat memengaruhi banyak orang dalam sekejap. Apalagi, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda untuk memilah dan memilih informasi. Membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan.

Bukan tanpa alasan, hoaks mengenai Covid-19 marak bertebaran di media sosial. Menurut Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto, di balik terciptanya kabar hoaks selalu ada kepentingan pembuatnya. "Mulai dari kepentingan ekonomi, politik, bahkan sampai dengan kepentingan untuk mengacaukan atau memecah belah kehidupan berbangsa," jelas Henri dalam beberapa kesempatan diskusi dan seminar mengenai hoaks.



PERSEBARAN HOAKS TERKAIT VIRUS CORONA

PERIODE 23 JANUARI – 20 APRIL 2020



Tak Cukup Klarifikasi

Kementerian Kominfo berupaya proaktif dalam mengklarifikasi konten hoaks yang tersebar di media sosial. Oleh karenanya, meski dalam masa bekerja dari rumah (*work from home*) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini, Tim AIS Direktorat Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo terus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menyusun klarifikasi atas hoaks yang beredar di masyarakat.

Bahkan, Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam dan mencegah penyebaran hoaks, termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian RI guna melakukan penindakan tegas bagi pembuat dan penyebar kabar bohong mengenai pandemi Covid-19.

"Tentunya tindakan para penyebar hoaks ini telah melanggar Undang-Undang

ITE, tepatnya pasal 27 dan 28. Ancaman hukuman pidana dan sanksi berupa denda untuk produsen dan penyebarannya tercantum di sana," tutur Menteri Johnny dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Setiap harinya, melalui laman resmi kominfo.go.id, laporan isu hoaks bisa diakses oleh masyarakat melalui tautan <https://kominfo.go.id/inihoaks>. Hasil identifikasi tim AIS, kategori hoaks mengenai Covid-19 sangat beragam. Mulai dari hoaks tentang skenario krisis ekonomi di Indonesia, informasi tentang obat-obatan penangkal virus corona, cara pencegahan maupun penularan virus corona, pemberian paket internet gratis, hingga hoaks tentang beberapa Kepala Negara yang melakukan pertaubatan akibat adanya virus ini.

Sebagai warga negara yang baik, setiap orang harus bisa memilah dan membatasi dirinya untuk tidak mempercayai informasi hoaks. Pasalnya, hoaks bukan hanya masalah pemerintah semata, melainkan juga akan berdampak ke masyarakat dan elemen yang ada di negeri ini.

"Jadi harus lebih berhati-hati lagi ya dalam memilih informasi yang beredar, karena dampak hoaks juga sama bahayanya dengan pandemi corona itu sendiri," tulis akun Instagram Kementerian Kominfo.

Pada tataran minimal, guna membasmi hoaks mengenai Covid-19 bisa dimulai dari diri sendiri. Caranya mudah. Mari sebar kabar baik dengan tetap menjaga kesehatan dan bekerja, belajar dan berdoa #dirumahaja.

“Setali 3 Uang”

**Covid-19 di Indonesia, Amplifikasi Hoaks Corona,
dan *Neurosis Anxiety* Publik**

Oleh: Fransiskus Emilus D. Kadju
Tim AIS Kementerian Kominfo



Dalam buku *Nyanyian Sang Katak*, Antony de Mello menggambarkan secara jelas tentang *anxiety* atau gangguan kecemasan yang mengakibatkan kematian. Dikisahkan bahwa suatu hari, seorang Musafir bertemu Wabah dan bertanya, “kamu mau mengambil berapa korban di daerah tersebut?”

“1000 saja cukup,” jawab Wabah.

Ternyata, ketika sang Wabah pulang, korban di daerah tersebut bukan 1000, melainkan 5000. Ketika perjalanan pulang, sang Musafir ketemu lagi dengan si Wabah dan berkata, “Kamu ingkar janji, katanya 1000 mengapa jadi 5000?”

“Aku mengambil 1000 sesuai kataku, yang 4000 ikut mati karena cemas, khawatir, dan paranoid,” tutur sang Wabah.

Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Respon Pemerintah

Covid-19 telah menjadi fenomena anomali yang saat ini tengah menggemparkan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Betapa tidak, virus yang awalnya menyebar di Wuhan, China, justru saat ini telah menyebar ke 185 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Melansir peta penyebaran Virus Corona, Coronavirus Covid-19 Global Cases by John Hopkins CSSE mencatat bahwa hingga Jumat (17/04/2020) siang, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 2.159.450 kasus dengan korban meninggal sebanyak 145.568 orang. (data coronavirus.jhu.edu/map per 17 April 2020 pukul 01:38 pm)

Di Indonesia, korban Covid-19 terus bertambah dari semula 2 kasus, menjadi 4 kasus, lalu 6 kasus, 19 kasus, 27 kasus, 34 kasus, hingga per hari Kamis (16/04/2020) sore, jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 5.516 orang. Dari jumlah tersebut, 548 orang sembuh, 496 meninggal, dan sisanya masih dirawat. (data covid19.go.id per 16 April 2020 pukul 16.05 WIB)

Saat ini, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Selasa, 7 April 2020, setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes), dengan penerapan secara efektif mulai 10 April 2020. Status PSBB disandangkan ke DKI Jakarta karena sampai saat ini DKI masih tercatat sebagai provinsi penyumbang kasus

positif Covid-19 terbanyak di Indonesia dengan jumlah 2.670 kasus (data covid19.go.id per 16 April 2020 pukul 16.05 WIB).

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Tak hanya itu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB guna menanggulangi penyebaran corona.

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona pun melakukan beragam upaya guna menekan angka penyebaran virus tersebut.

Antisipasi itu mulai dari *social distancing* hingga *physical distancing* atau jaga jarak diri. Tak hanya itu, masyarakat pun diimbau untuk mengurangi aktivitas diluar rumah yang tidak terlalu penting. Bahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta juga diterapkan Work For Home (WFH) guna menekan angka penyebaran. Meskipun, masih ada masyarakat yang harus kerja ke lapangan demi mencari nafkah.

TNI dan Polri pun sudah melakukan upaya pencegahan. Mulai dari melarang seluruh kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa seperti resepsi pernikahan, seminar ataupun hal lainnya. Itu dilakukan sementara selagi corona masih menjadi pandemi.

Indonesia di Tengah Gempuran Covid-19 dan Amplifikasi Hoaks Corona

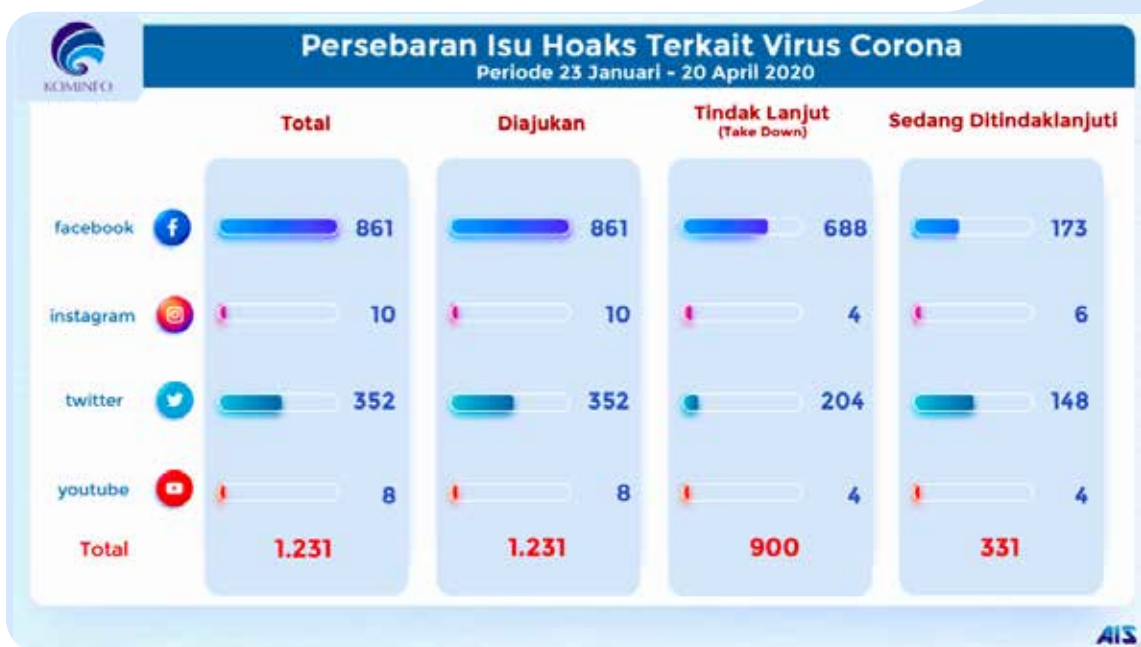
Pada era disrupsi media komunikasi publik seperti saat ini, tentunya berbagai macam informasi akan begitu cepat menyebar ke publik, bahkan tanpa melalui *gatekeeper*. Semua orang bisa bertindak sebagai konsumen sekaligus produsen informasi. Akibatnya, banyak informasi hoaks entah itu sifatnya misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi menyebar ke publik dan menimbulkan ketakutan dan kecemasan berlebihan.

Secara sederhana, misinformasi berarti salah informasi. Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain. Berbeda dengan misinformasi, dalam disinformasi si penyebar informasi tahu kalau informasinya memang salah. Namun sengaja disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.

Sementara itu dalam malinformasi, informasinya sebetulnya benar. Sayangnya, informasi itu digunakan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi cemas dan takut akan suatu hal tertentu. Ketiga model ini, baik itu misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi sangat nampak dalam amplifikasi informasi tentang ancaman virus Corona.

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang cukup signifikan selama dua

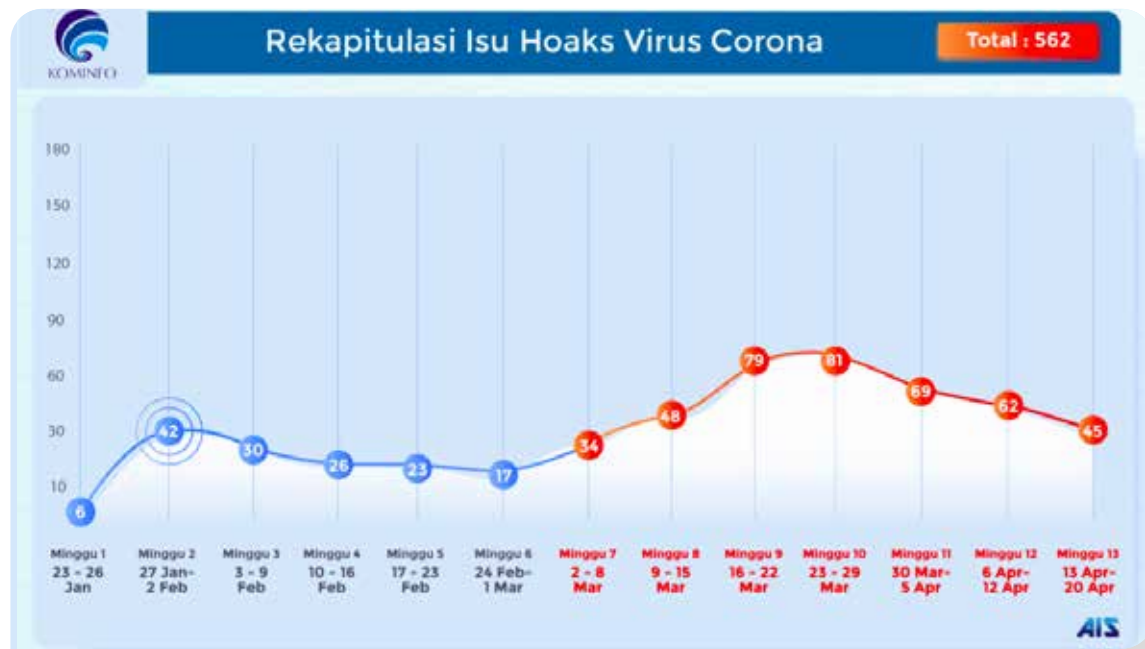
bulan terakhir, telah membuat masyarakat semakin cemas dan takut. Namun kecemasan tersebut tidak hanya terjadi karena kejadian faktual, melainkan karena banyaknya hoaks tentang Corona yang berseliweran di jagat maya secara ubikuitas dan kumulasi. Berikut ini data hoaks Corona yang dihimpun tim AIS menggunakan Crawling Data dari mesin AIS:



Tim AIS merupakan tim khusus yang menangani tentang lalu lintas percakapan di media sosial dan dan mengawasi pemberitaan media-media *online*. Tim ini bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu menggunakan mesin AIS yang dilengkapi oleh Artificial Intelligence Natural Language Processing. Tim ini berada di bawah komando Taruli, S.H., M.H. sebagai Kasi Pemblokiran Konten Internet bersama Riko Ramadan sebagai Kasi Infrastruktur Pengendalian Konten Internet di bawah Sub-Direktorat Pengendalian Konten Internet Kementerian Kominfo yang dikepalai oleh Anthonius Malau.

Berdasarkan platform media sosial, penyebaran hoaks virus corona di Indonesia periode 23 Januari hingga Senin (20/04/2020), paling banyak ada di Facebook dengan total 861 kasus dengan rincian: 688 di-takedown dan 173 outstanding atau dalam proses. Sementara itu Twitter menempati urutan kedua dengan 352 kasus dengan rincian: 204 di-takedown dan 148 outstanding atau dalam proses.

Data ini juga secara gamblang menunjukkan bahwa hampir semua kanal media sosial dikepung oleh narasi-narasi hoaks tentang virus corona.



Data ini menunjukkan bahwa hingga Senin (20/04/2020), Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menemukan sebanyak 562 konten hoaks atau berita bohong tentang virus corona yang berseliweran di jagat maya.

Kasus hoaks pertama muncul pada 23 Januari 2020. Pada periode minggu pertama yaitu dari 23 Januari hingga 26 Januari, terdapat 6 temuan tentang corona. Tren ini meningkat signifikan pada minggu kedua, yaitu periode 27 Januari hingga 2 Februari dengan 42 temuan. Selanjutnya tren bergerak menurun hingga minggu keenam yaitu dengan 17 temuan. Tren kemudian kembali meningkat pada minggu ke-7 hingga minggu ke-10 mencapai 81 temuan, lalu kembali turun pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13 menjadi 45 temuan.

Temuan hoaks tersebut amat beragam, mulai dari soal sumber penyebaran, sebaran pasien di sejumlah rumah sakit, formula pencegahan dan penyembuhan dengan mengonsumsi bawang putih, banyaknya masyarakat yang "menjarah" bahan sembako di pusat-pusat perbelanjaan, hingga hoaks tentang korban meninggal akibat Corona. Kendati kabar tersebut hoaks, ada begitu banyak masyarakat yang percaya bahkan ikut menyebarkan informasi tersebut sehingga menimbulkan *engagement* tinggi di media sosial.

Hoaks Corona, Anxiety Publik, dan Jalan Keluar

Peningkatan jumlah hoaks Corona yang jauh lebih tinggi dari jumlah riil positif Covid-19 pada enam minggu pertama sejak kasus perdana, justru membuat masyarakat Indonesia masuk dalam apa yang saya sebut sebagai *anxiety* publik. Kondisi ini ditandai dengan animo publik yang mengalami kecemasan berlebihan terhadap kondisi pribadi dan lingkungan hidup akibat ubikuitas dan kumulasi dari amplifikasi hoaks tentang corona. Belum lagi semua media pemberitaan dan media sosial turut membuat amplifikasi dan *engagement* terhadap kondisi riil pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tentang *anxiety*, Bapak Psikoanalisis, Sigmund Freud dalam Alwisol (2005: 28) mengatakan bahwa kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga

dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego, karena kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya, dan kalau tidak dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai ego dikalahkan. Kecemasan juga merupakan suatu keadaan perasaan yang tidak menyenangkan, disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Keadaan yang tidak menyenangkan itu sering kabur dan sulit menunjuk dengan tepat, tetapi kecemasan itu sendiri selalu dirasakan.

Sementara itu, Sutardjo Wiramihardja (2005: 66) menganggap kecemasan sebagai suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Sedangkan menurut Kaplan, Sadock, dan Grebb (Fitri Fauziah & Julianti Widuri, 2007:73) kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup.

Dalam bahasa psikoanalisis, kecemasan berlebih disebut sebagai *anxiety disorder*. Tentang hal ini, David A. Clark dan Aaron T. Beck dalam bukunya yang berjudul *Cognitive Therapy of Anxiety Disorder* (2010: 5) mengatakan bahwa *anxiety disorder* adalah:

A complex cognitive, affective, physiological, and behavioral response system (i.e., the anxiety system) that is activated when anticipated events are deemed to be highly aversive because they are unpredictable, uncontrollable, and potentially threaten the vital interests of the individual.

Clark dan Beck sebenarnya ingin mengatakan bahwa secara sederhana, kecemasan terjadi karena manusia merasa tidak aman dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Kecemasan bisa terjadi karena sebuah ancaman nyata ataupun khayal karena kecemasan adalah reaksi afeksi alamiah yang dapat dialami oleh siapapun. Namun cemas yang berlebihan, apalagi sudah termasuk gangguan kecemasan atau *anxiety disorder* akan menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya. Individu yang mengalami *anxiety disorder* akan disertai perubahan fisiologis dan psikologis karena kecemasan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang tentang suatu hal yang tidak menyenangkan dan mengganggu eksistensi dirinya. (Namora Lumongga Lubis, 2009:14).

Berdasarkan pengertian di atas, ketakutan yang berlebihan atau *anxiety disorder* terhadap kasus virus corona di Indonesia tentunya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat, baik

secara fisiologis, maupun secara psikologis. Bila sudah sampai tahap yang lebih universal, akan ada gangguan ekonomi, psikogeografis, dan krisis-krisis multidimensional lainnya. Oleh karena itu, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melawan amplifikasi hoaks tentang virus corona yaitu:

1. Saring sebelum *sharing*

Banyaknya hoaks tentang virus Corona yang menyebar selama dua bulan terakhir ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak masyarakat yang tidak menyaring informasi yang masuk terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke media sosial. Maka, hindarilah perilaku "cepat-cepatan" yang kecenderungannya ingin menjadi yang pertama dalam menyampaikan informasi publik. Bila menerima informasi, lakukan *fact checking* terlebih dahulu ke media-media kredibel, pun melalui grup anti hoaks yang hingga saat ini sudah cukup aktif mengampayekan tagline "lawan hoaks."

2. Jangan membagikan informasi yang belum jelas, apalagi menciptakan hoaks tentang Corona

Masyarakat juga diharapkan untuk tidak secara sengaja menyebarkan hoaks tentang corona melalui media sosial dan cara-cara lainnya, apalagi konten hoaks tersebut berpotensi menimbulkan *anxiety* dari masyarakat. Berkaca pada kenyataan faktual, saat ini sudah ada 5 orang yang ditangkap karena terbukti menyebarkan konten hoaks corona yang menyebabkan kecemasan publik. Perbuatan melawan hukum ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang tidak sadar bahwa konten hoaks yang dibuat bahkan yang disebar bisa mendatangkan efek negatif bagi diri sendiri dan orang lain.

3. Ikuti update informasi resmi tentang Corona

Untuk menghindari hoaks, masyarakat perlu mengikut *update* informasi tentang kasus corona Indonesia yang setiap harinya terus di-*update* oleh Juru Bicara Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto.

4. Patuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan WHO dan otoritas pemerintah pusat.

Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain: pertama, *social distancing* yakni menghindari kerumunan atau tidak menciptakan kerumunan. Kedua, *physical distancing* atau menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, minimal satu meter. Ketiga, *stay at home*. Berdiam di rumah (isolasi mandiri) adalah pilihan terbaik. Bila terpaksa harus keluar, hendaklah hanya untuk urusan yang benar-benar urgen. Keempat, selalu memakai masker dan sarung tangan ketika berada di luar rumah.

5. Jangan Cemas Berlebihan

Kisah tentang Sang Musafir dan Sang Wabah yang digambarkan Antony de Mello dalam ilustrasi pembukaan di atas sebenarnya menunjukkan bahwa kecemasan berlebihan terhadap virus Corona adalah hal yang keliru. Waspada boleh, tapi takut yang berlebihan justru akan membuat kita semakin terpuruk dalam *anxiety* bahkan *anxiety disorder* yang merugikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Psychological and
(threat mode) that is
or circumstances are
cause they are perceived
the events that could
needs of an individual.**



PeduliLindungi

Upaya Bekali Masyarakat Putus Mata Rantai Penularan Covid-19



Jakarta, Kominfo – Penerapan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik menjadi salah satu cara memutus penyebaran Virus Corona dan Covid-19. Adalah PeduliLindungi, aplikasi kolaborasi Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) serta operator telekomunikasi yang bisa digunakan sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi dan mencegah pandemi Covid-19.

Aplikasi ini dapat memandu pengguna untuk menjaga jarak dan mengidentifikasi individu dengan status positif Covid-19, status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

PeduliLindungi membantu setiap orang melakukan surveilans kesehatan berupa *tracing* (penelusuran), *tracking* (pelacakan) dan *fencing* (pengurungan) untuk saling menjaga dan melindungi agar penularan Covid-19 dapat dihentikan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui infrastruktur, sistem, dan aplikasi telekomunikasi, sesuai dengan regulasi bidang kesehatan, kebencanaan, telekomunikasi, informatika, dan bidang terkait lainnya. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Covid-19 melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika yang ditandatangani pada 26 Maret 2020.

Menteri Komunikasi Johnny G. Plate optimis PeduliLindungi dapat memutus mata rantai penularan virus corona penyebab Covid-19.

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meyakini kehadiran aplikasi PeduliLindungi dapat membantu dalam memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 atau Corona penyebab Covid-19 di masyarakat,” ujar Menteri Johnny di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (08/04/2020).

Cara Kerja PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi bekerja dengan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP), menggunakan data yang diproduksi oleh ponsel pintar pengguna dengan *bluetooth* aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan.

Ketika ada *smartphone* lain dalam radius *bluetooth* yang juga terdaftar di PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran ID anonim yang akan direkam oleh perangkat masing-masing. Pengguna aplikasi akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian, atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang terdata ada orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau Pasien Dalam Pengawasan.

“Saat dua *Bluetooth* bertemu maka akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 atau PDP maupun ODP,” tulis pengembang aplikasi tersebut di Play Store.

Fitur *tracking* pada aplikasi dapat mendeteksi pergerakan individu yang terpapar Covid-19 selama 14 hari ke belakang. Aplikasi juga terhubung dengan operator selular lainnya untuk menghasilkan visualisasi yang sama. Berdasarkan hasil *tracking* dan *tracing*, nomor di sekitar pasien positif Covid-19 yang terdeteksi akan diberikan *warning* untuk segera menjalankan protokol kesehatan. Aplikasi ini juga digunakan untuk memonitor pendatang dari luar negeri dan pos lintas batas.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak. “Kami berharap dengan itu maka pasien, orang yang sudah tertular, atau yang masih di dalam pemantauan ataupun yang diistilahkan sebagai ODP dapat dimonitor secara *online* pergerakannya,” tutur Menteri Johnny.

Pengguna akan dihubungi oleh petugas kesehatan jika pernah berada dalam jarak tertentu dengan penderita COVID-19 positif, PDP, dan ODP. Sehingga petugas kesehatan bisa melakukan tindakan preventif terhadap orang-orang yang pernah berada di tempat dan waktu yang sama dengan penderita.

Jamin Data Pribadi

Menteri Kominfo turut meminta masyarakat untuk tidak ragu mengunduh PeduliLindungi, karena *provider* menggunakan sistem keamanan berlapis untuk menjaga pengguna dari potensi *phishing* dan *malware*. Selain itu PeduliLindungi turut memperhatikan kerahasiaan data pribadi pengguna. Data disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain.

Aplikasi hanya akan merekam data *proximity* (kedekatan) satu ponsel dengan ponsel lainnya dalam format terenkripsi. Aplikasi juga tidak merekam data geolokasi pengguna. Sedangkan nomor ponsel yang didaftarkan akan direlaskan dengan ID *random* di dalam server yang aman. Data tidak akan diakses, kecuali jika pengguna dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Ketentuan dan perlindungan data pribadi pengguna dalam aplikasi dijamin melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020. Kepmen tersebut menetapkan PeduliLindungi bersifat khusus, berlaku hanya untuk keadaan darurat wabah sampai dengan pemerintah menyatakan keadaan kondusif dan keadaan darurat diakhiri.

Karya Anak Negeri

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa PeduliLindungi dirancang oleh putra-putri Indonesia. "Meskipun ada kesamaan fungsi (dengan TraceTogether, red.), namun aplikasi yang dikembangkan oleh sejumlah Kementerian/Lembaga ini memiliki konfigurasi yang berbeda. Mengingat infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi kita yang berbeda dengan subscriber hampir 300 juta MSISDN. Di samping itu fiturnya juga lebih kaya misalnya akan dikembangkan fitur *fencing* dan *warning*," imbuhnya.

PeduliLindungi bertujuan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang terdekat lainnya, serta menghentikan penyebaran virus corona dengan mengandalkan partisipasi masyarakat. Aplikasi dimaksudkan untuk mendorong pengguna untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai penyebaran COVID-19 dalam komunitas lokal mereka sendiri sebagai cara untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melacak riwayat perjalanan seseorang guna mencegah penyebaran Covid-19.





Menurut Menkominfo, hingga Kamis (23/04/2020), aplikasi PeduliLindungi telah diunduh lebih dari 2,6 juta pengguna sejak dirilis awal April. Menteri Johnny berharap, dengan partisipasi masyarakat melakukan pengunduhan aplikasi tersebut, dapat dilakukan monitoring secara *online* pergerakan pasien, yang sudah tertular, maupun yang masih di dalam pemantauan serta dapat melakukan isolasi-isolasi wilayah.

“Sehingga kelihatan yang mana dan ke mana saja pergerakan virus melalui data-data dari para pasien atau yang sudah terdaftar di dalam sistem. Akan sangat membantu kita untuk segera memutus mata rantai sebaran Covid-19,” paparnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny meminta masyarakat untuk segera mengunduh dan melakukan instalasi PeduliLindungi pada gawainya masing-masing. Dengan demikian, kepada masyarakat akan diberikan informasi realtime secara langsung bahwa di sekitar mereka dalam jarak 2 sampai 5 meter, berpotensi adanya virus karena ada carrier virus yang berada di sekitar mereka untuk segera menghindar dan menjauhkan diri darinya.

Kominfo Gotong Royong Percepat Penanganan Covid-19

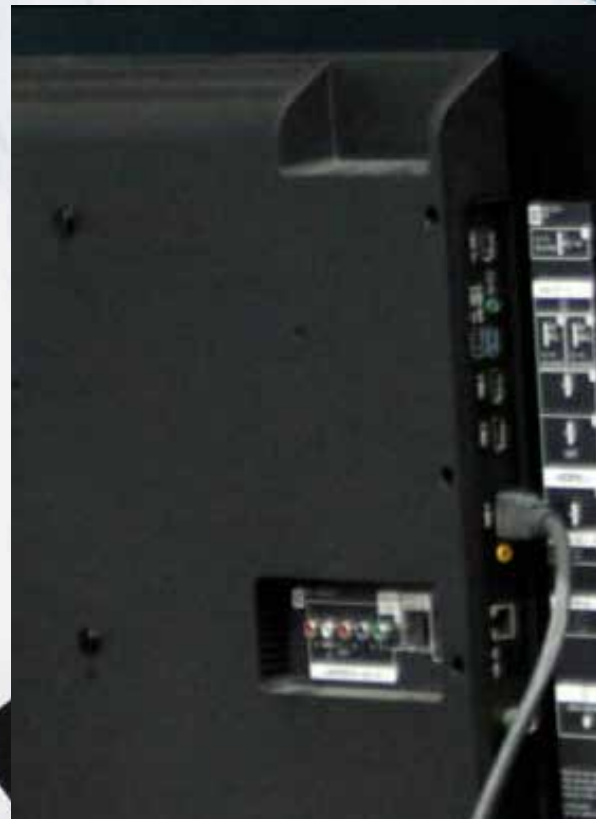
Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan unsur *pentahelix*, yakni pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media, dalam mendukung penanganan dampak Virus Corona (Covid-19). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa keterlibatan kelima unsur itu dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif.

"Kami memanfaatkan betul jejaring kerja sama *pentahelix*, karena memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus kolaboratif dan sistematis. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah. Kemudian juga dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media," tutur Menteri Kominfo dalam Rapat Kerja bersama Anggota Komisi I DPR RI melalui konferensi video dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (07/04/2020).

Dalam Rapat Kerja itu, Menteri Kominfo menyatakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, Kementerian Kominfo mendukung penuh setiap upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon Covid-19.

"Komunikasi publik juga dilakukan secara terus-menerus untuk menyampaikan apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, dukungan terhadap UMKM, pemulihan perekonomian, pelaksanaan jaring pengaman sosial, pembatasan sosial berskala besar, kebijakan terkait mudik, dan sebagainya," tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan seluruh informasi disebarkan ke semua jaringan baik media sosial, media *mainstream*, maupun media konvensional.



" Kami mema pentahelix, k Cov

la menegaskan dukungan Kementerian Kominfo dilaksanakan sesuai dengan koridor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Saat ini kami mendukung secara penuh Gugus Tugas termasuk dalam aktivitas komunikasi publik agar komunikasi publik antar elemen bangsa dapat terselenggara dengan baik dan bisa mendukung pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19," tandasnya.



**Manfaatkan betul jejaring kerja sama
arena memutus rantai penyebaran
Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri.
Harus kolaboratif dan sistematis.** //

Tangani Hoaks Covid-19

Dalam rapat kerja itu, Menteri Kominfo juga memaparkan tentang upaya Kementerian Kominfo dalam mengidentifikasi dan menangani penyebaran hoaks yang berkaitan dengan Covid-19.

"Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Sebanyak 359 konten sudah dilakukan penindakan dengan *take down*, sementara

737 konten sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti," jelas Menteri Kominfo.

Menteri Johnny menyatakan ada juga kasus hoaks yang sudah ditangani oleh Polri. "Kami berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, di mana 21 Polda dan Bareskrim Polri telah menangani 77 kasus hoaks terkait Covid-19 dan tentu kami mengapresiasi langkah cepat dan kolaborasi dengan Polri," tuturnya.



**“ Kominfo juga bergotong royong meny
layanan prima melalui aplikasi PeduliL
Kami meyakini dengan kerja bersama
energi positif, bangsa Indonesia akan
mata rantai penyebaran Covid-19. ”**



Menyediakan dukungan
PeduliLindungi.
untuk menggerakkan
berhasil memutus

Aplikasi PeduliLindungi

Dukungan *pentahelix* menurut Menteri Johnny tidak hanya dilakukan dalam diseminasi informasi dan komunikasi publik. Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo juga bergotong royong untuk menyiapkan berbagai dukungan layanan prima melalui aplikasi PeduliLindungi agar bisa segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menteri Kominfo menyatakan bahwa aplikasi tersebut merupakan kerja sama Kominfo, Kementerian BUMN, Kemenkes, dan BNPB dalam naungan Gugus Tugas Covid-19.

“Melalui aplikasi ini, dapat dilakukan *tracking* atau bisa melihat pergerakan seseorang yang positif Covid-19 secara historis. Selanjutnya *tracing*, untuk mengetahui dengan siapa saja seseorang yang positif Covid-19 melakukan kontak. Dan juga *fencing*, memberikan batasan bagi seseorang dalam pengawasan/positif melakukan pergerakan (dalam karantina dan isolasi),” paparnya.

Dalam membangun sistem ini, Kominfo menjamin perlindungan data pribadi setiap warga yang menggunakan aplikasi. “Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 159 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa data pribadi akan dilindungi dan pemanfaatan aplikasi itu hanya sampai pandemi ini dinyatakan selesai,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyampaikan kembali upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dengan melakukan gotong royong. “Kami meyakini dengan kerja bersama untuk menggerakkan energi positif, pasti bangsa Indonesia akan berhasil. Bersama DPR RI dan seluruh kekuatan nasional, kita pasti akan berhasil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Hasil Rapat Kerja

Berikut hasil rapat yang disepakati oleh Anggota Komisi I DPR RI dan Menteri Kominfo:

1. _____

Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo terkait pengendalian informasi penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai tupoksi Kemkominfo.

2. _____

Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Kominfo untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan program diseminasi informasi non-medis terkait penanganan Covid-19 baik *offline* maupun *online* secara masif dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan dan merata ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
- b. Menyampaikan informasi dari pemerintah terkait data, program, informasi yang simetris dan konsisten dengan narasi yang positif terkait penanganan Covid-19 untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Mendeteksi berita hoaks dengan cepat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- d. Memantau secara intensif kinerja layanan telekomunikasi dan internet sehingga kualitas layanan tetap terjaga dengan baik selama masa darurat Covid-19 di wilayah pemukiman dan secara khusus meningkatkan layanan di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di seluruh Indonesia.

3. _____

Komisi I DPR RI mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa aplikasi PeduliLindungi untuk pencegahan dan penanganan pandemik Covid-19 dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kominfo untuk lebih meningkatkan sosialisasi pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk diteruskan kepada masyarakat.





Raker Virtual Pertama

Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo secara virtual itu berlangsung dari pukul 15.00 s.d. 17.18 WIB. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya diikuti oleh 53 orang Anggota Komisi I DPR RI.

Penyelenggaraan secara virtual sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan rapat tetap harus dalam keadaan Waspada Covid-19 sehingga dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau secara virtual.

Menurut Menteri Johnny, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, DPR dan Kominfo menggelar Rapat Kerja melalui virtual *video conference*. "Rapat kerja secara virtual ini juga memberikan gambaran bahwa bangsa kita tengah mengalami transformasi digital. Sebuah era baru yang menyimpan begitu banyak peluang dan harapan. Peluang dan harapan untuk memperkokoh keunggulan bangsa kita diantara bangsa-bangsa lain di dunia," tandasnya.



Kominfo Gelar

Rapid Test Covid-19

untuk Pekerja Media dan Pegawai

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar *rapid test* atau tes cepat untuk pekerja media dan pegawai Kominfo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19). Tes cepat dilakukan dengan sistem *drive thru* di Kantor Kementerian Kominfo agar menghindari penciptaan kerumunan dan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19 tentang *physical distancing*.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa pemeriksaan bagi pekerja media dan pegawai itu diharapkan dapat menyajikan informasi awal tentang kondisi kesehatan pekerja media dan pegawai.

"Ini memang bukan untuk diagnosa Covid-19 secara langsung, melainkan untuk melihat respon antibodi yang ada dalam tubuh. Jadi hasil pengukuran akan menjadi deteksi awal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita selenggarakan untuk pekerja media karena salah satu profesi yang paling berisiko adalah mereka," tuturnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (08/04/2020). Menurut Menteri Kominfo, inisiatif itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Pak Jokowi menyatakan dalam situasi saat ini dibutuhkan gotong royong dan komunikasi yang baik. Nah, kami ingin

memastikan kesehatan pekerja media agar tetap dapat menjalankan kerja jurnalistik dan tetap bisa menyampaikan informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung secara virtual, Selasa (07/04/2020), Menteri Johnny menyatakan pelibatan unsur *pentahelix*, yakni pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media dalam mendukung penanganan dampak Covid-19. "Kami memanfaatkan betul jejaring kerja sama *pentahelix*. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus kolaboratif dan sistematis. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Kemudian juga dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media," tuturnya.

758 Pekerja Media Mendaftar

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan, hingga kemarin, tercatat sebanyak 758 pekerja media terdaftar dalam tes cepat yang digelar Kementerian Kominfo dan Halodoc. "Hari ini pelaksanaannya mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Ada 758 pekerja media yang mendaftar dan yang telah datang melakukan *rapid test* sebanyak 350 orang. Semua kita layani dengan cara *drive thru*," ujarnya. Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, layanan pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Halodoc. Selanjutnya pemeriksaan juga dilakukan oleh tim Halodoc. Dalam pemeriksaan, peserta tidak perlu turun dari kendaraan pribadi masing-masing. "Hasil pemeriksaan kemudian akan diberitahukan melalui aplikasi," tambah Sekjen Niken.

Selain bagi pekerja media, Kementerian Kominfo juga menggelar *rapid test* bagi pegawai Kementerian Kominfo. Sebanyak 994

pegawai telah mengikuti tes cepat tersebut. Jika ditotal dengan pekerja media, maka tes cepat telah diikuti oleh 1344 orang dalam tiga hari terakhir.

Tes cepat Covid-19 merupakan metode pemeriksaan untuk melacak infeksi virus SARS-CoV-2 dengan mengambil sampel darah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dalam penjelasan kepada media di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Rabu (25/03/2020), menyebutkan bahwa *rapid test* tidak diarahkan untuk menegakkan diagnosa karena *rapid test* yang kita gunakan adalah *rapid test* yang berbasis pada respon imunologi. "Kita tahu kalau virus masuk ke dalam tubuh kita maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi yang akan kita ukur dan inilah yang kemudian akan dideteksi," tuturnya.

TEKNO LOGI & GAD GET

Penyakit Covid-19 masih terus menghantui masyarakat Indonesia. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi laju penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran lebih luas adalah dengan mengisolasi orang yang positif menderita Covid-19.

Hal ini menjadi sulit karena karakteristik virus ini yang mudah menular namun baru menimbulkan gejala pada penderitanya setelah 7-14 hari terinfeksi. Bahkan pada beberapa orang tidak menimbulkan gejala sama sekali, atau timbul gejala yang sangat ringan. Karakteristik yang demikian membuat banyak orang tidak sadar telah menularkan penyakit kepada orang lain karena merasa dirinya sehat-sehat saja.

Review Aplikasi PeduliLindungi



Oleh karena itu, melacak orang yang pernah berkontak dengan orang yang dinyatakan positif menjadi penting. Jika semua orang yang pernah kontak dengan pasien positif dapat diisolasi maka kita dapat mencegah penularan lebih lanjut. Pemerintah telah membuat berbagai kriteria orang yang terpapar oleh penyakit Covid-19 selain orang yang sudah dinyatakan positif oleh tes PCR, di antaranya kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Namun, melacak kontak bukanlah hal yang mudah jika dilakukan secara manual tanpa alat bantu yang tepat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan berbagai kementerian/lembaga lain bekerja sama untuk membuat sebuah aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi yang terinspirasi dari TraceTogether di Singapura ini berperan untuk melakukan *tracing*, *tracking*, dan *fencing* terhadap penderita Covid-19. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play Store bagi pengguna *smartphone* Android, dan App Store bagi pengguna iOS.

#PeduliLindungi

Lindungi diri Anda dan yang tercinta dari penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).



Mari Berpartisipasi!

Dengan berpartisipasi di PeduliLindungi, Anda turut membantu menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).



Aplikasi PeduliLindungi bekerja dengan memanfaatkan GPS dan Bluetooth yang terdapat di *smartphone* pengguna. Cara penggunaannya pun sederhana. Setelah mengunduh dari toko aplikasi masing-masing *platform*, pengguna dapat menjalankan aplikasi ini dan memasukkan nama beserta nomor ponsel yang dimiliki. Lalu sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, sistem akan mengirimkan SMS berisi kode yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi untuk memastikan bahwa nomor ponsel tersebut benar. Setelah itu aplikasi akan meminta kepada sistem untuk mengizinkan akses terhadap GPS dan Bluetooth. Setelah pengguna mengizinkannya, maka aplikasi ini akan berjalan dengan sendirinya di latar belakang selama ponsel menyala.

Lalu apa saja manfaat dari PeduliLindungi? Bagi yang sehat dan tidak terdata sebagai pasien positif, ODP, ataupun PDP, aplikasi ini akan selalu memberikan notifikasi yang menunjukkan status zona tempat pengguna berada. Dengan memanfaatkan GPS, ketika ponsel tersebut berpindah antar zona hijau, kuning, atau merah maka akan muncul notifikasi yang menunjukkan status zona tempat ponsel tersebut berada. Selama aplikasi ini berjalan, PeduliLindungi akan memanfaatkan Bluetooth untuk mencatat pengguna-pengguna lain yang juga memasang aplikasi ini pada ponselnya dan berada dalam radius Bluetooth ponsel.

Data riwayat kontak melalui Bluetooth inilah yang sangat berharga ketika suatu saat ada yang dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19. Dengan data kontak yang ada, maka akan sangat mudah untuk menghubungi semua orang yang pernah kontak dengan penderita selama 14 hari terakhir agar memeriksakan kesehatannya atau melakukan isolasi mandiri.

Maka dari itu, sangat penting agar sebanyak mungkin masyarakat memasang dan mengaktifkan aplikasi ini di ponsel masing-masing terutama ketika berada di luar rumah. Dengan demikian maka upaya pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 dapat berjalan dengan lebih cepat dan optimal sehingga kita bisa segera memberantas virus ini.



**SELAMAT
HARI KARTINI
PERAWAT KU
PAHLAWAN KU**



**SEMANGAT KARTINI
SELALU HIDUP HINGGA KINI**

Selamat Hari Kartini

*Dari perempuan
Indonesia yang
saat ini menjadi
garda terdepan
dalam berjuang
menangani serta
melawan
pandemi
COVID-19*



**TENAGA KESEHATAN
KAMI SELALU
BERSAMA KALIAN**



Sumber :

Antara Foto, <https://www.youtube.com/watch?v=dbyfZUdxMNO&feature=youtu.be>

Dua Jenis Tes Covid-19

Pakar Gugus Tugas
Percepatan Penanganan
COVID-19 Prof. drh.
Wiku Adisasmito M.Sc,
Ph.D menjelaskan bahwa
terdapat dua jenis tes
Covid-19, yaitu *rapid test*
dan *swab test*.



"Tes digambarkan dengan dua jenis. Tes pertama caranya adalah dengan *screening* yang sering disebut dengan *rapid test*. *Rapid test* adalah tes cepat, hasilnya cepat" katanya dalam Konferensi Pers "Dialog: Seputar Covid-19 & Cara Mendeteksinya" di Media Center Gugus Tugas, Rabu (15/4/2020).

Wiku mengatakan ada dua tipe *rapid test* untuk Covid-19. "Satu yang mengukur antibodi atau sistem imun kita terhadap Covid-19. Satu lagi menilai terhadap antigenya atau virusnya, ini lebih jarang dan tidak bisa ditangani oleh sembarangan" tuturnya.

Lebih lanjut Wiku menjelaskan tes cepat yang lebih sering digunakan yaitu dengan mengukur antibodi. Fungsi *rapid test* antibodi tersebut akan efektif untuk mengukur jika tubuhnya sudah memiliki antibodi. "Kalau sudah ada antibodi, biasanya sudah ada gejalanya dulu. Jadi dengan adanya gejala, itu reaksi tubuh melawan virus, melawannya dengan antibodi" katanya.

Wiku turut menjelaskan pentingnya penggunaan *rapid test* di waktu yang tepat, karena hasil *rapid test* dapat negatif, tergantung pada antibodi yang biasanya muncul tujuh hari setelah terinfeksi. "Pada saat kita terinfeksi dan kita misalnya kelihatan sehat, atau yang disebut Orang Tanpa Gejala, lalu diuji melalui tes cepat atau *rapid test* tadi, hasilnya bisa negatif karena belum ada gejala atau baru saja mulai gejala. Jumlah antibodinya belum cukup untuk bisa dideteksi oleh tes cepat itu," jelasnya.

Selain melakukan tes di waktu yang tepat, hasil *rapid test* juga bisa negatif jika alat



tesnya tidak berkualitas. "*Rapid test* yang cepat ini juga punya kekurangan dan banyak syarat yang harus kita ikuti untuk mendapatkan hasil yang benar" kata Wiku.

Selain *rapid test*, ada pula *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, tes dengan pemeriksaan yang lebih akurat karena yang dideteksi adalah virus, bukan antibodi. "Cara kerja RT Polymerase Chain Reaction adalah membalik virusnya, dari RNA harus dibalik dulu menjadi DNA sehingga mesinnya bisa membaca" kata Wiku.

RT-PCR atau yang biasa disebut *swab test* adalah tes yang mengambil cairan tubuh yang paling banyak mengandung virusnya. "Yang sering disebut *swab* itu adalah usap, dipakai alat diusap masuk melalui hidung yang sangat dalam karena disitulah letaknya ada cairan. Atau bisa juga menggunakan yang paling banyak jumlah virusnya yaitu di dahak" jelas Wiku. Menurut Wiku, *swab test* atau RT-PCR dapat menangkap virus sekalipun pada Orang Tanpa Gejala.

Wiku mengatakan, untuk menganalisa seseorang terdampak Covid-19 atau tidak adalah ranahnya dokter yang bisa melihat dari sisi anamnesa. "Jadi dilihat dulu ada gejalanya atau tidak sesuai dengan (kriteria gejala, red.) covid. Setelah ada gejala seperti itu, baru dilakukan tes. Tes awal bisa dilihat dari kondisi keadaan darah, tes laboratorium, dan bisa juga dengan rontgen" jelas Wiku.



“We’re all in this together”

Di saat pemerintah dengan segala pertimbangannya mengambil kebijakan dan langkah taktis untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, masyarakat pun turut ambil bagian, saling membantu sesama dengan caranya masing-masing. Terkadang, bahkan “tanpa pertimbangan”.

Ada yang mendonasikan uangnya lewat penggalangan dana di saat ia menjadi salah satu pihak yang terpaksa dirumahkan akibat pandemi. Ada perkumpulan ibu-ibu di Banda Aceh yang turun ke jalanan membagikan paket sembako bagi pekerja lepas sekaligus mengedukasi tentang pencegahan Corona. Ada pula warga di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang bergantian memasak setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tiga anak yang tinggal sendiri selama ibunya dikarantina karena berstatus Pasien dalam Pengawasan (PDP).

PerCalah
PASTI PUL
Indonesia
Bisa

Jika Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam rubrik Perspektif Menteri edisi ini mengatakan *"this too shall pass"*, maka masyarakat Indonesia seakan menyambutnya dengan pesan *"we're all in this together. Kami bersamamu, Indonesia."*

Dampak COVID-19 pada masyarakat tentu berbeda. Namun di tengah kekalutan akan ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir, terselip kehangatan melihat berbagai gerakan, inisiatif, kampanye, dari masyarakat untuk bahu membahu meringankan beban saudaranya yang terdampak pandemi ini. Seakan tiap gerakan mendengungkan semangat yang sama. Indonesia bisa. Indonesia kuat bersama.

Panjang umur kemanusiaan!

AKU
ANG, M
Indonesia
Kuat Bersama



JENIS BANTUAN



Alat Pelindung Diri (APD)



Alat Desinfektan



Tissue Basah



Hand Sanitizer



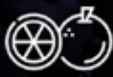
Sabun Cuci Tangan



Sembako & Kebutuhan Pokok



Vitamin



Buah

Penggalangan Dana



Salah satu kampanye penggalangan dana terbesar menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia diinisiasi oleh kitabisa.com. Seminggu setelah diumumkannya kasus pertama corona di Indonesia, *platform crowdfunding* ini menggalang Gerakan Kemanusiaan Bersama untuk Melawan Corona.

Mengutip situs kitabisa.com (<https://galangdana.kitabisa.com/partners/bersamalawancorona>), terdapat 5018 kampanye yang berada di bawah gerakan #BersamaLawanCorona ini, dengan donasi hingga Selasa (28/04/2020) mencapai Rp117,4 miliar. Donasi ditujukan untuk berbagai kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, mulai dari tenaga medis, pekerja lepas.

Penerima Manfaat



Tenaga Kesehatan dan Masyarakat yang Membutuhkan

Bantuan : Alat Pelindung Diri (APD)



Tenaga Kesehatan

Bantuan : Paket Makanan



Dhuafa dan Pekerja Informal

Bantuan : Paket Sembako



Fasilitas Publik dan Rumah Ibadah

Bantuan : Penyediaan Disinfektan dan Wastafel

Sumber :

https://www.covid19.go.id/materi_category/aksi-masyarakat/

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/22/cmon-lift-their-spirits-neighbors-wave-away-covid-19-stigma-in-jakarta.html>

<https://www.suara.com/news/2020/04/10/185928/3-anak-isolasi-mandiri-tanpa-orang-tua-bagaimana-kebutuhan-dasar-mereka>

<https://news.act.id/berita/pemberdayaan-di-kala-covid-19-penghuni-lapas-produksi-10-000-masker>

Sumber Foto :

Antara Foto, Unsplash, act.id

Ribuan kampanye yang tergabung dalam Gerakan Kemanusiaan Bersama untuk Melawan Corona ini merupakan inisiasi mandiri oleh berbagai lapisan masyarakat; mulai dari *brand*, perusahaan asuransi, perusahaan telekomunikasi, organisasi mahasiswa, selebriti, *influencer*, hingga komunitas fans grup Korean-pop (K-Pop). Berikut beberapa kampanye penggalangan dana yang tergabung dalam Gerakan #BersamaLawanCorona:

Kampanye Indonesia Lawan Corona

- o Inisiator: kitabisa.com
- o Target donasi: Rp30 miliar
- o Hingga 28/04/2020 terkumpul lebih dari **Rp25,9miliar**

Telah mendistribusikan APD ke 37 titik klinik dan Puskesmas se-Indonesia, menyalurkan PPE set, Hazmat suit, APD, sarung tangan medis, dan kebutuhan medis lainnya ke berbagai Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, serta instalasi wastafel portable di 22 lokasi.



Fundraiser

DANA	Wardah Family
Telkomsel Poin	Softex Care Club
Sekolah Relawan	CIMSA Indonesia (Organisasi Mahasiswa Kedokteran se-Indonesia)
NKCTHI	Central Park Neo Soho
AXA dan AXA Mandiri	SMA Kolese Gonzaga Jakarta
Kaskus	Buttonscarves (<i>fashion brand</i>)
Persija Jakarta	Andhika Pratama & Ussy Sulistiawaty, Baim Wong Maia Estianty, Raffi Ahmad, Nagita Slavina & Rafathar (selebriti)
Pegipegi	Retno Hening, Rachel Vennya, Dwi Handayani, Alanda Kariza, Arief Muhammad dan Tiara Pangestika (<i>influencer</i>)
Liputan6.com	BTS ARMY, CARATS, BLINK Indonesia (K-Pop <i>Fanclub</i>)
Kumparanderma	Atta Halilintar, Ria Ricis, Jang Hansol (Youtuber)
LinkAja	
Zalora	

#BERSAMALAWANCORONA



Diinisiasi pada

12 Maret 2020



5018

Kampanye



Donasi Mencapai

Rp117,4 miliar

(per 28/04/2020)





Konser Musik #DiRumahAja

- o Target donasi: Rp15 miliar
- o Hingga 28/04/2020 terkumpul lebih dari Rp13,4 miliar

Telah menyalurkan 800 APD & *Face shield* untuk PPDS RSCM, paket sembako untuk 6.200 KK di 38 posko seluruh Indonesia, 10.000 paket materi belajar non-digital bagi anak-anak marjinal tanpa akses internet



Satu Padu Lawan dan Cegah COVID-19

- o Inisiator: Dompot Dhuafa
- o Target donasi: Rp2 miliar
- o Hingga 28/04/2020 terkumpul lebih dari Rp636 juta

Telah membangun RS Lapangan Kartika Pulomas, instalasi bilik disinfektan (*disinfection chamber*) dan fasilitas cuci tangan untuk publik, penyaluran bantuan makanan bagi tenaga kesehatan, hingga layanan pemulasaran jenazah sesuai protokol Kesehatan



Konser Amal dari Rumah #SobatAmbyarPeduli

- o Inisiator: Kompas TV
- o Target donasi: Rp8 miliar
- o Terkumpul Rp6,057 miliar (kampanye telah berakhir)

Telah menyalurkan sembako dan uang tunai melalui LAZIS NU dan Muhammadiyah bagi 33.850 KK (pedagang kecil, korban PHK, pekerja kasar, & kelompok rentan lainnya)



Sembako untuk Pengemudi

- o Inisiator: Rhenald Kasali
- o Target donasi: Rp700 juta
- o Hingga 28/04/2020 terkumpul lebih dari Rp937,8 juta

Telah menyalurkan sembako, uang tunai, dan paket vitamin untuk sekitar 16.000 pengemudi taksi



Penggalangan dana dalam skala besar turut diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap. Lembaga kemanusiaan global yang berdiri sejak tahun 2005 ini bergerak cepat menggelar aksi medis begitu kasus pertama positif Corona diumumkan di Indonesia.

Mengusung tema #BersamaLawanCorona #BersamaSelamatkanBangsa, tim ACT menggelar aksi medis mulai dari edukasi, pembagian alat kesehatan, hingga aksi pencegahan dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan wabah virus Corona ini. ACT turut mendirikan Corona Crisis Center sebagai bentuk kepedulian nasional dan langkah awal proses mitigasi

Pembagian makanan, beras, hingga air minum gratis pun turut dilakukan bagi mereka yang terdampak dari sisi sosial dan ekonomi akibat wabah ini. ACT juga mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui IndonesiaDermawan.id/bersamalawancorona. Diinisiasi pada 3 Maret 2020, ACT berhasil mengumpulkan lebih dari Rp3,4 miliar (per 28/04/2020) dari target Rp4 miliar. Dana yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk berbagai program, di antaranya Operasi Pangan Gratis, Operasi Makan Gratis, dan Operasi Beras Gratis.

Operasi Makan Gratis

Tim ACT membuka Layanan Warung Gratis sebagai bagian dari operasi ini di sejumlah kota, di antaranya Medan, Bukittinggi, Palembang, Jakarta, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Malang, hingga Ambon. Sejak digelar, lebih dari 700 warteg ikut bergabung dalam operasi ini.

APD dan Humanity Food Truck Bagi Tenaga Medis

Sementara untuk tim medis COVID-19, ACT membantu penyediaan 3000 porsi/hari makanan, vitamin, dan juga APD atau Alat Proteksi Diri seperti baju hazmat, masker N95, masker bedah, *surgical cap* dan *helmet face shield*.

Operasi Beras Gratis

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendistribusikan 1,25 ton beras melalui Operasi Beras Gratis di Pool Taksi Blue Bird Condet, Jakarta Timur, Jumat, (24/04/2020). Selain pengemudi taksi yang terdampak wabah akibat menurunnya pendapatan, bantuan juga diserahkan kepada karyawan, tukang cuci, dan petugas bengkel yang ada di *pool* Condet, Jakarta Timur.



MS Glow dan ACT Malang memproduksi 10.000 Masker kain yang dikerjakan oleh para perempuan binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Bantuan masker dibagikan ke masyarakat luas di Kota Malang pada Selasa (21/4), bertepatan dengan Hari Kartini.



Uluran Tangan Dunia Internasional

Selain inisiatif masyarakat Indonesia, berbagai negara dan organisasi internasional turut hadir membantu Pemerintah Indonesia dalam percepatan penanganan COVID – 19.

Gugus Tugas mencatat per 24 April 2020 sebanyak 9 negara, 9 organisasi internasional dan 70 organisasi nonpemerintah memberikan dukungan untuk penanganan wabah virus SARS-CoV-2. Total nilai dukungan yang diterima Pemerintah Indonesia adalah senilai USD77,49 juta.

Kesembilan negara tersebut yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Uni Emirat Arab.

Selain donasi dari luar negeri, Indonesia juga mendapatkan bantuan material kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), ventilator, RT-PCR dan *reagen*, *thermometer* dan *virus transport medium* (VTM). Dari bantuan tersebut, masker, *rapid test* dan APD merupakan jenis bantuan paling banyak diterima oleh Indonesia.

Adapun organisasi internasional yang memberi dukungan dalam penanganan COVID – 19 di Indonesia, yaitu WHO, ADB, IAEA, UNDP, IOM, Global Fund, Unicef, IDB dan Uni Eropa, dan organisasi nonpemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di 12 negara, seperti RRT, Singapura, AS, Korea Selatan, Vietnam, Perancis, Rusia, Jerman, Jepang, Swedia, Swiss dan Arab Saudi.



“ Pemerintah tidak mungkin sendiri untuk menghadapi pandemik *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19. Peran masyarakat maupun sukarelawan, sangat penting dalam membantu percepatan penanganan ”

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo

Indonesia

#TurunTangan

Jika kitabisa.com, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Relawan Gugus Tugas, tergolong dalam kategori aksi skala besar, maka kita tak boleh lupa aksi swadaya masyarakat yang ikut turun tangan membantu warga sekitar lingkungannya. Berikut beberapa aksi masyarakat yang terdokumentasi dalam situs covid19.go.id

Keresahan Berubah jadi Kasih Sayang

Cimahi, Jawa Barat



Setelah sejumlah warga Perumahan Cipageran Cimahi mengikuti Rapid Test, beredar kabar ada keluarga positif. Warga pun resah dan mendesak tokoh masyarakat bertindak, meminta keluarga itu dirawat di rumah sakit. Bahkan, ada warga yang bersiap pindah rumah karena resah tertular.

Sambil tetap menjaga jarak aman, Pak Yuli menjelaskan dengan tenang.

“Yang positif tapi sakit ringan memang dirawat di rumah. Tidak menular asal kita jaga jarak, pakai masker, dan mereka tidak boleh keluar rumah sampai sembuh,” jelasnya.

Takut terjadi apa-apa, Pak Yuli, koordinator perumahan, bergerak cepat. Ia mengontak Dinas Kesehatan, Gugus Tugas, hingga Puskesmas setempat mencari informasi tentang COVID-19.

Menyimak itu, sejumlah ibu di perumahan terenyuh dan mencetuskan gerakan sendiri. Tiap pagi ibu-ibu bergantian memasak bagi keluarga tersebut. Kini makin banyak ibu yang bersedia memasak makanan sehingga dibuat jadwal bergantian. Kasih sayang warga membuat keluarga itu semakin bersemangat sembuh. Tolong menolong memang menjadikan kita lebih kuat menghadapi wabah ini.

Esok paginya, Pak Yuli mengumpulkan warga dan tokoh-tokoh masyarakat di luar rumah.

Kuat Bersama

Gunung Sahari, Jakarta Pusat



Di tengah banyaknya stigma negatif terhadap pasien COVID-19, warga RW 04 Gunung Sahari Utara justru bahu membahu memenuhi kebutuhan tiga kakak-beradik berusia 15, 13, dan 10 tahun, yang menjalani isolasi mandiri setelah ibunya berstatus Pasien Dalam Pengawasan dan dikarantina di Wisma Atlit, Jakarta Pusat. Selama menjalani isolasi mandiri, pengurus RW setempat memastikan kebutuhan makanan, vitamin, dan kesehatan ketiga anak tersebut terpenuhi. Pagi hari mereka biasanya dikirimkan bubur ayam untuk sarapan, sementara makan siang dan malam disiapkan oleh warga secara bergantian.

Bantuan Sembako Plus Edukasi

Banda Aceh

Wabah COVID-19 tentu berimbas pada ekonomi dan yang akan pertama merasakan adalah masyarakat rentan. Menyadari itu, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh bergerak cepat melakukan penggalangan dana. Dana terkumpul dibelikan paket sembako bagi pedagang kecil, tukang parkir, buruh kasar, tukang rumput, tukang cuci pakaian, penjual kue dan

penyandang disabilitas. Total 74 orang menerima paket untuk membantu mereka bertahan selama wabah. Sambil menyampaikan bantuan, Kopelma mengedukasi penerima tentang pencegahan penyebaran virus dengan tetap dirumah saja, sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak aman (lebih dari 1 meter), menghindari keramaian, serta tidak panik dan tetap tenang.

Solidaritas Ibu-Ibu Kampung Kramat

Cililitan, Jakarta

Di tengah wabah virus corona, ibu-ibu Kampung Kramat Cililitan Jakarta berbagi untuk menunjukkan solidaritas. Dengan semangat, ibu-ibu PKK berkeliling kampung mengumpulkan donasi para ibu dengan tetap menjaga jarak aman. Sambil itu, ibu-ibu PKK juga memberi penyuluhan pencegahan COVID-19 dan nasihat memakai masker setiap keluar rumah.



Gerakan Mandiri Saling Bantu Antar Tetangga

Bantul, Yogyakarta

Penolong terdekat kita adalah tetangga. Di saat wabah tetangga harus saling membantu agar tidak ada keluarga yang terpuruk. Gerakan Mandiri Saling Bantu AntarTetangga di Gemuk Indah Desa Ngestiharjo Bantul mengambil semangat tolong menolong antartetangga, khususnya untuk mengamankan ketersediaan pangan di keluarga, edukasi, dan alat kebersihan.

Dimulai 3 April 2020, pengurus RT dan PKK bergerak mengumpulkan donasi uang, bahan pangan dan alat kebersihan. Dari pendataan didapat 33 rumah tangga rentan yang perlu mendapat bantuan pangan, alat kebersihan maupun edukasi. Bukan sekali kegiatan, gerakan diharapkan tetap berlanjut selama wabah COVID-19 bahkan sesudahnya.

Tak Sampai 24 Jam, Terkumpul Rp 1 Miliar

Jakarta

Semangat saling membantu menguat di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia. Salah satunya influencer Rachel Venny yang memprakarsai penggalangan donasi melalui kitabisa.com. Kurang dari 24 jam terkumpul dana Rp 1 miliar yang kemudian dibelikan 1000 baju hazmat untuk disalurkan ke RS rujukan pemerintah. Kampanye Tolong Menolong Lawan COVID-19 ini hingga saat ini masih berjalan, dengan donasi terkumpul mencapai Rp9,096 miliar (per 28/04/2020).



Kisah Gotong Royong Warga, Tak Mudik Untuk Putus Wabah Corona

Kabupaten Bogor, Kominfo – Perang melawan Corona tentu saja memang tak mudah dimenangkan. Yang kita hadapi bersama adalah lawan yang tak kelihatan. Butuh kerja kolektif yang tak setengah-setengah, kewaspadaan tingkat tinggi yang meniadakan lengah. Kedisiplinan warga negara sangat dibutuhkan, inisiatif bersama untuk saling menjaga juga menentukan. Corona jelas merupakan batu ujian bagi seluruh elemen.

Pada Selasa (21/04/2020) lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penetapan larangan mudik bagi seluruh masyarakat perantauan ke kampung halamannya masing-masing, sebagai salah satu bagian dari kebijakan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait penetapan larangan ini?

Beberapa waktu lalu tim KominfoNext berkesempatan berbincang dengan warga di wilayah Cibinong, Jawa Barat, terkait larangan tradisi tahunan yang selalu dilakukan hampir sebagian besar penduduk Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Bagi Mustahal Prakoso (56), Ketua RT Perum Bogas RT 001 / RW 011 Perumahan Bogor Asri Cibinong, Jawa Barat, hari-hari pandemi jadi hari yang cukup menguras perhatian Selaku Ketua RT Perum Bogas, ia memberikan perhatian lebih bagi warga agar tetap tinggal di rumah, menghindari bepergian, dan tidak mudik. Tujuannya memastikan imbauan pemerintah dijalankan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

“Untuk mencegah tertular Covid-19 yang pertama tetap tinggal di rumah, karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus,” tegas Mustahal kepada KominfoNext, di Bogor, Selasa (24/04/2020) petang.

Mustahal menuturkan banyak sekali orang tanpa gejala atau OTG menjadi pembawa Covid-19. Lantaran tak mudah mengenali secara kasat mata, Ketua RT itu menyatakan lebih baik tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak atau bertemu langsung dengan orang lain selama pandemi Covid-19.

Sumber Foto : Unsplash



Kami mengingatkan gotong royong, mari bersatu melawan Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memiliki komitmen yang kuat. Mari kita yang berada di rumah tangga, mari kita yang berada di RT, di RW, di desa merespon ini dengan baik tetap berada di rumah dan produktif di rumah.

Mustahal Prakoso,
Ketua RT Perum Bogas

“Kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus, tidak bisa membedakan orang-orang seperti ini dengan mata biasa. Oleh karena itu, jangan bepergian, jangan mudik. Kita harus memastikan kita tidak tertular, atau malah mungkin kita yang menjadi sumber kita tidak menularkan ke orang lain,” kata Mustahal dari tempat terpisah.

Dengan diam di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah, tidak bepergian, dan tidak mudik, setidaknya upaya ini dapat melindungi diri agar tidak tertular virus Corona atau menularkan penyakit itu ke orang lain.

Satgas Gotong Royong

Mustahal menyampaikan, agar wabah ini tidak meluas, beberapa warga membentuk satuan tugas (Satgas) protokol kesehatan di tingkat Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) sesuai anjuran pemerintah.

“Sesuai arahan Presiden untuk segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di lingkungan tempat tinggal, jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus Corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan maka harus segera kami bantu,” jelasnya. Ini semua, menurut Mustahal, bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi, serta tidak ada yang terabaikan. Satgas Protokol Kesehatan dan Posko Peduli Covid-19 ini dibentuk dengan tujuan melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan yang bisa dilakukan setiap warga, serta mensterilkan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara swadaya.

“Tentunya yang paling efektif kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan informasi tentang bahayanya virus ini sehingga ada suatu kepedulian dari dalam diri mereka sebagai warga. Kami berharap akan menimbulkan

kesadaran dari masing-masing akan bahayanya wabah Covid-19," ungkap Mustahal.

Bahkan, kepada warga, Mustahal meminta untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan penularan virus tersebut, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan di wilayah Bogor Asri. Selain itu, gotong-royong dan saling peduli juga terus diterapkan. Menurut Mustahal penyebaran dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari diri sendiri.

"Kami mengingatkan gotong royong, mari bersatu melawan Covid-19. Seperti yang telah pemerintah anjurkan, tentunya kami sampaikan kepada warga agar menerapkan disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Mari kita yang berada di rumah tangga, mari kita yang berada di RT, di RW, di desa merespons ini dengan baik tetap berada di rumah dan produktif di rumah," ajaknya.

Semprot Disinfektan dan Sekat Jalan

Salah satu kerja satgas untuk memutus penyebaran Covid-19 menurut Mustahal adalah penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar. "Di lingkungan kami, bersama swadaya masyarakat di tingkat RT dan juga kerjasama di tingkat RW 11, kita lakukan penyemprotan disinfektan secara berjangka atau secara periodik seminggu sekali," jelasnya.

Kerja Satgas bukan tanpa tantangan. Jika ada warga yang tidak mematuhi dengan adanya pemberlakuan PSB di lingkungannya, maka digunakan pendekatan persuasif hingga teguran.

"Bertahap kami akan menyampaikan secara persuasif. Kemudian tindakan-tindakan yang lebih tegas memberikan bentuk berupa sanksi. Tidak seperti penegak hukum, namun setidaknya lebih intens untuk menegur dan mengingatkan. Sanksi tersebut bisa berupa memutarbalikkan kendaraan atau tidak

diperbolehkan untuk melintas saat memasuki wilayah perumahan," kisahnya.

Tunda Mudik, Lewati Masa Sulit

Tim KominfoNext juga berkesempatan mewawancarai Sekretaris Satgas Covid 19 Wilayah Bogor Asri, Johan terkait penerapan kebijakan PSBB dan larangan mudik. Menurut Johan, sehari sebelum adanya aturan PSBB Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Bogor, Ketua RT, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Ketua RW dan Ketua Satgas Covid-19 Bogor Asri telah berkoordinasi mengenai larangan kepada warga untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun 2020.

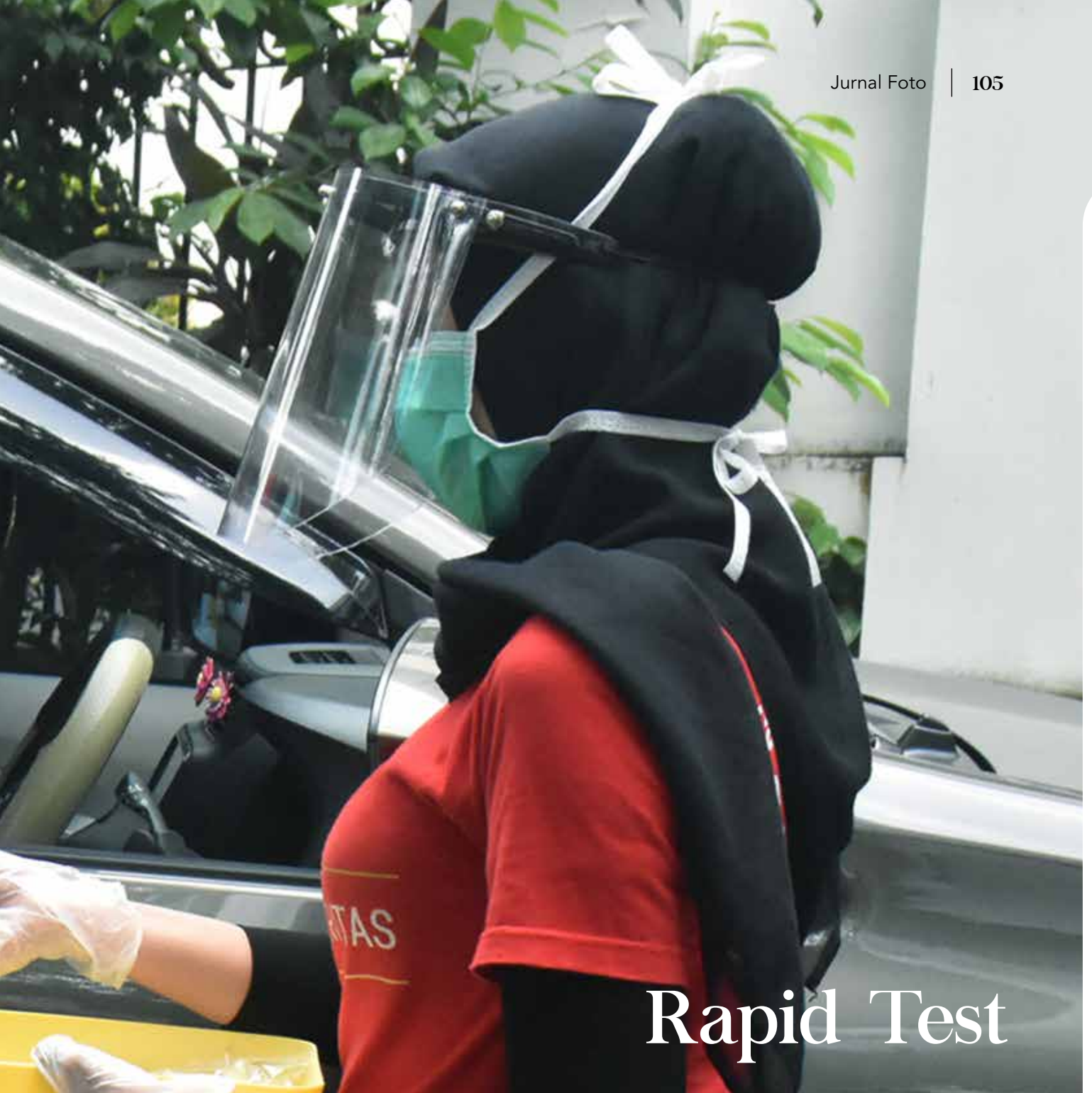
Johan juga menyampaikan, untuk satgas Covid-19 di wilayah Bogor Asri melibatkan unsur warga serta pemuda dari Karang Taruna yang terdiri dari 22 orang petugas, dan terbagi menjadi tiga shift jadwal piket.

Sejumlah aktivitas terus dilakukan berupa pengetatan terhadap pintu-pintu masuk serta jalan tembus ataupun jalan-jalan menuju akses utama ke perumahan Bogor Asri. "Tujuannya untuk menetralsir warga-warga yang kami tidak kenal atau tidak diketahui histori perjalanannya dari mana dan ke mana," tandasnya.

Menurut Johan, ketika sampai di rumah atau kampung halaman setelah bepergian atau melakukan perjalanan, maka yang dikhawatirkan adalah virus yang dibawa dari luar rumah menyebar ke anggota keluarga di rumah atau di kampung halaman. Selain diri sendiri, anggota keluarga dan kelompok rentan seperti orang tua dan mereka yang memiliki penyakit kronis juga harus dijaga dari potensi penularan Covid-19.

"Jika orang-orang yang rentan ini terkena Covid-19, maka mereka nantinya akan jatuh dalam kondisi sakit yang berat. Selain itu, untuk melawan virus ini, masyarakat harus tetap meningkatkan imunitas diri, sabar dan tenang, beristirahat cukup dan teratur, serta tidak panik," tutupnya. (hm.ys)





Rapid Test

Petugas Halodoc melakukan Rapid Test Covid-19 pada salah seorang pegawai Kementerian Kominfo yang menggunakan mobil di area parkir Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (6/04/2020)

1

Rapid Test

Suasana saat Rapid Test Covid-19 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan startup kesehatan Halodoc untuk seluruh pegawai Kementerian Kominfo dan Wartawan yang diadakan dari tanggal 6-8 April 2020 di area Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta



2

Suasana saat Rapid Test Covid-19 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan startup kesehatan Halodoc untuk seluruh pegawai Kementerian Kominfo dan Wartawan yang diadakan dari tanggal 6-8 April 2020 di area Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta





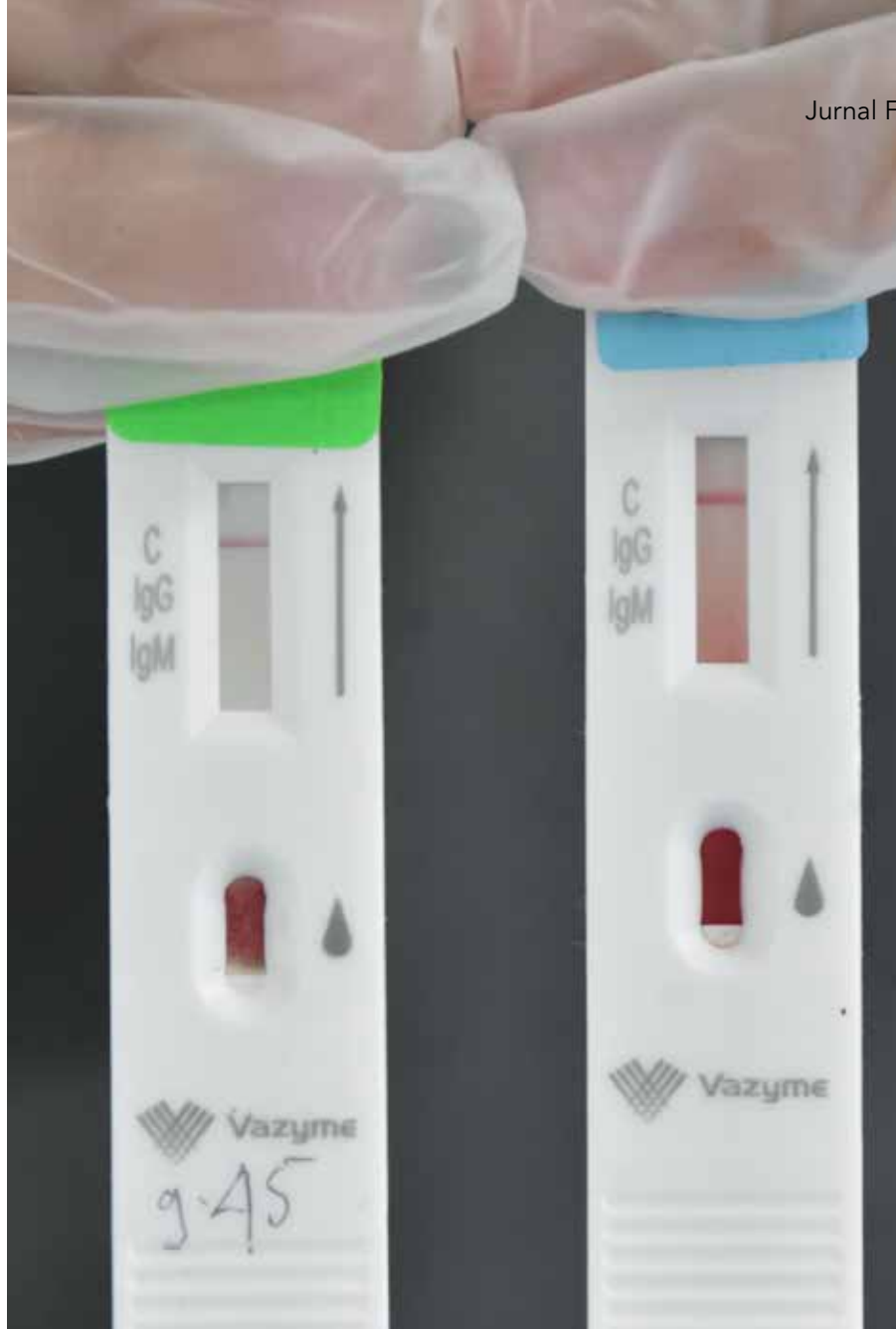
Petugas dari Tim Halodoc mengambil sample darah salah seorang pegawai Kementerian Kominfo saat melakukan Rapid Test Covid-19 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona, diselenggarakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (6/4/2020)

4



Salah seorang Dokter Halodoc memberikan pengarahan kepada petugas sebelum dilakukan Rapid Test Covid-19 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona bagi seluruh pegawai Kementerian Kominfo dan Wartawan, diselenggarakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (6/4/2020)





5

Salah seorang petugas Halodoc menunjukkan Alat yang digunakan untuk mengetahui hasil dari Rapid Test yang bertujuan untuk mendeteksi darah seseorang apakah ada atau tidak antibodi Covid-19 pada tubuhnya



Antara Foto

Melalui Protokol, Pemakaman Jenazah COVID-19 Aman dari Penularan

Pandemi COVID-19 sedang menjadi wabah bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Data per 22 April 2020 dari World Health Organization (WHO) menerangkan bahwa lebih dari 165.000 meninggal di 213 negara/kawasan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa lebih dari 500 pasien meninggal dikarenakan virus tersebut.

165.000 JIWA
Meninggal
terinfeksi **COVID-19**
di **213 Negara/Kawasan**

Data 22 April 2020

Hal yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah mengenai pemakaman jenazah COVID-19. Beberapa tempat menolak pemakaman tersebut dikarenakan takut akan penularan virus tersebut. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Panduan atau Protokol Pengurusan Jenazah Pasien COVID-19.

Protokol tersebut mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh WHO sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

3 Hal Utama dalam Protokol Pengurusan Jenazah Covid-19

- 1 Pengurusan Jenazah
- 2 Shalat Jenazah
- 3 Penguburan Jenazah

Protokol dalam pengurusan jenazah

Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas Kesehatan pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Jenazah pasien COVID-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.

Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas.

Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam

Shalat jenazah

Untuk pelaksanaan shalat jenazah, dilakukan di Rumah Sakit Rujukan. Shalat jenazah juga bisa dilakukan di masjid yang sudah melakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah shalat jenazah.

Shalat jenazah dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 (empat) jam.

Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang

Penguburan jenazah

(sesuai edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama)

Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat.

Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1.5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter.

Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah



Suntikan Insentif Pejuang Garda Depan COVID-19

“
Saya ingin
perindungan maksimal
ke dokter dan tenaga
medis yang melayani
pasien COVID-19.
– Presiden Jokowi

Rapat Terbatas Kabinet pada Rabu (18/03/2020) berjalan melalui *video conference* yang dihadiri oleh Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sejak pandemi COVID-19 merebak, Presiden Jokowi mengubah kebiasaannya dalam berkoordinasi dengan menteri-menterinya dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga rapat dilakukan secara terpisah dari rumah ataupun kantor masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjalankan kebijakan *physical distancing* untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia.

Rapat pagi itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang dibuka dengan tujuh arahan penanganan COVID19. Salah satu arahan yang disinggung Presiden Jokowi yaitu perlindungan secara maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran rumah sakit yang melayani pasien COVID-19, memastikan ketersediaan alat pelindung diri serta pemberian insentif kepada tenaga medis. Arahan ini kembali ditegaskan Presiden Jokowi dalam rapat di hari selanjutnya dengan langsung menugaskan Menteri Keuangan selaku bendahara negara untuk menyusun skema pemberian insentif tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya langsung bergerak menyusun skema, terutama alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pemberian insentif tersebut. Skema yang diusulkan yaitu *burden sharing* atau pembagian beban, termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan untuk biaya operasional kesehatan, dan DAK Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

"Ini sudah disetujui oleh Presiden, dan saya telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk bisa segera dilaksanakan," ungkap Menkeu Sri Mulyani di Jakarta (24/03/2020).

Sebelumnya, di sela-sela peresmian RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta (23/03/20), Presiden Jokowi menyampaikan besaran insentif untuk masing-masing tenaga medis. Untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum / gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. Selain itu, akan ada santunan kematian sebesar Rp300 juta bagi tenaga medis yang meninggal akibat tertular corona. Insentif ini hanya berlaku untuk daerah yang sudah menyatakan tanggap darurat.

Merujuk pada data Litbang Kompas tanggal 2 April 2020, jumlah total tenaga medis (dokter dan perawat) di Indonesia sebanyak 159.720 personil. Dengan skema insentif di atas, pemerintah diperkirakan harus menyiapkan dana berkisar antara Rp3,1 triliun hingga Rp6,1 triliun. Melalui konferensi pers pada Selasa (31/3), Presiden Jokowi telah mengetok palu penambahan belanja dan anggaran penanganan COVID-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Terdapat empat bidang insentif dalam penambahan anggaran yang diatur dalam Perppu ini, salah satunya insentif bidang kesehatan sebesar Rp7,5 triliun, di mana penggunaan anggarannya diperuntukkan antara lain bagi insentif dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan realokasi anggaran yang ada, baik di pusat dan daerah, agar dialokasikan kembali untuk penanganan COVID-19. "Teknisnya seperti biasa melalui Kementerian Keuangan. Nanti ditransfer melewati pemerintah daerah, kalau peruntukannya ke daerah. Saya kira daerah

mempunyai cara-cara yang baku sesuai prosedur yang ada," terang Wapres melalui *video conference* pada media di Kediaman Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/3). Lebih lanjut, Kementerian Keuangan akan memantau kemampuan daerah untuk bisa mengalokasikan insentif melalui APBD.

Dilansir dari laman liputan6.com, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih mengungkapkan rasa terima kasih atas insentif bagi para tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19. "Saya mewakili organisasi profesi dokter sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kami berterima kasih soal insentif tersebut," ungkap Daeng.

Mekanisme Pembagian

Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, saat ini mekanisme pemberian insentif dari pengusulan hingga pencairan telah ditetapkan dan siap untuk dijalankan. Untuk mekanisme pemberian insentif kepada tenaga medis, pertama, RSUD, RS Swasta, dan Puskesmas mengusulkan insentif kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) di Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kemudian Dinkes akan mengajukan usulan tersebut kepada Tim Verifikasi Kemenkes (Badan PPSDM Kesehatan). Selanjutnya tim verifikator akan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah Kemenkeu menerima hasil verifikasi, data akan diteliti ulang, kemudian dana insentif tenaga medis tersebut akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Terakhir, Pemerintah Daerah akan menyalurkan dana insentif dari RKUD ke rekening masing-masing tenaga medis dengan mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh Pemda setempat.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan tata kelola anggaran atas pelaksanaan pembayaran insentif tenaga medis di daerah, Pemda akan melaporkan realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang dibuat dalam format sederhana dan hanya dibuat satu kali, yaitu pada akhir tahun anggaran 2020.

Baju Tempur Bagi Tim Medis COVID-19

Tim Medis dalam penanganan COVID-19 bagaikan seorang prajurit yang maju ke medan tempur. Seorang prajurit akan menggunakan baju zirah lengkap yang menutup dari atas kepala sampai ujung kaki untuk melindunginya selama berperang. Begitupula dengan tim medis yang menangani pasien COVID-19, 'baju zirah' menjadi wajib hukumnya untuk menjamin keselamatan tenaga medis di garda terdepan.

Kementerian Kesehatan memiliki standar tersendiri terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan COVID-19. APD tersebut terdiri dari masker, sarung tangan, *coverall*, gaun, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sepatu *boots* anti air. Dalam pemakaiannya, APD tersebut berjenjang disesuaikan dengan tingkat risiko penularan selama penanganan.

Tingkat pertama, diperuntukkan bagi tenaga medis yang bekerja di tempat praktik umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi penularan dan tidak menghasilkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan.



Antara Foto

Tingkat Pertama



Masker bedah



Gaun medis



Sarung tangan pemeriksaan

Tingkat kedua, untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di laboratorium maupun ruang perawatan pasien. Di ruang tersebut dilakukan aktifitas pengambilan sampel non-pernapasan. APD yang digunakan untuk tingkat ini terdiri dari penutup kepala, *goggle*, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai.

Tingkat ketiga, bagi tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol. Pada tingkat ini, tenaga kesehatan wajib untuk memakai APD berupa penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, atau *goggle*, masker N95, *coverall*, sarung tangan bedah dan *boots* anti air.

Salah satu bagian APD yang penting dalam menjaga tenaga medis dari penularan COVID-19 yaitu *coverall*. *Coverall* ini berfungsi untuk menahan cairan darah, *droplet* dan aerosol.

"Jika tenaga kesehatan bekerja di area dengan infeksi yang sangat tinggi maka diharuskan menggunakan *coverall* yang mampu menahan cairan, darah, *droplet*, dan aerosol," kata Sekretaris Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, drg Arianti Anaya, MKM, di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta, Jumat (17/4).

Material APD *coverall* tersebut biasanya dibuat dari *nonwoven* atau serat sintesis dengan pori-pori yang sangat kecil yaitu 0,2 sampai 0,54 mikron. Bahan tersebut harus melalui pengujian material di laboratorium terakreditasi.

APD, Prioritas!

APD menjadi perhatian serius bagi Presiden Jokowi dan jajarannya. Dalam rapat terbatas tentang penanganan pandemi COVID-19 di Istana Bogor (30/03), Presiden meminta agar APD tenaga medis dan penyediaan obat serta alat kesehatan menjadi prioritas utama saat ini.

"Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman, dengan peralatan kesehatan yang memadai dan pada 23 Maret yang lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165.000 APD ke setiap provinsi, saya juga minta ini betul-betul dipantau," ungkap Presiden Jokowi.



Tingkat Kedua

- penutup kepala
- goggle*
- masker bedah
- gaun
- sarung tangan sekali pakai.



Tingkat Ketiga

- penutup kepala,
- pengaman muka,
- pengaman mata atau *goggle*,
- masker N95,
- coverall*,
- sarung tangan bedah dan *boots* anti air.

Salah satu tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu untuk melengkapi kebutuhan alat keselamatan kesehatan tenaga medis. Tim yang dikomandoi Doni Monardo ini tercatat telah mendistribusikan sebanyak 725.000 APD, 13 juta masker bedah dan 150.000 masker N95.

Doni menyampaikan bahwa saat ini, tim ahli dari Gugus Tugas dibantu oleh peneliti dan periset dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga sedang berupaya memproduksi APD sendiri. "Kami sedang berupaya memproduksi APD dengan menggunakan komponen lokal dan bersertifikasi WHO," kata Doni lebih lanjut.

Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, menjadi salah satu komponen dalam insentif bidang kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 75 triliun oleh pemerintah. Dalam laporan yang diterima Presiden Jokowi, hingga saat ini, stok APD masih terbatas, dan berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan 3 juta APD sampai dengan akhir Mei. Presiden meminta agar dilakukan percepatan pengadaan APD. "Saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima, ada 28 perusahaan produsen APD di negara kita," ungkapnya.



“

Tujuan pemerintah
saat ini hanya satu:

**Keselamatan
seluruh rakyat,
baik keselamatan di
bidang kesehatan
maupun di bidang
ekonomi**

”

